PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

2019 - 2024

Edisi Rev. I - 2021

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG
Jl. Drs. Warsito No. 76,Teluk Betung Utara
BANDAR LAMPUNG

Kata Pengantar

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada Tim Penyusun Renstra Perubahan untuk menyelesaikan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 - 2024 ini.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi; Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang sudah dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku Renstra ini masih terdapat sejumlah kekurangan. Masih banyak keterbatasan dalam menyikapi permasalahan serta isu strategis yang berkembang menjadikan penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran, kritik, dan masukan lain yang membangun sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat di dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 - 2024 baik pikiran, tenaga, dan waktu. Semoga dokumen ini bisa digunakan sebagai bahan kajian, informasi serta sebagai acuan kegiatan tahun yang akan datang

Bandar Lampung, Januari 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ir. LIZA DERNI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680812 199903 2 003

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
2.2 Sumber Daya 16
2.3 Kinerja dan Pelayanan OPD 19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 36

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih ... 39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 43
3.5 Telaahan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 45
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis 48

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 49

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 51

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan 55

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 65

BAB VIII. PENUTUP

Penutup 62

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Potensi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Lampung … 17

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 17

Tabel 2.3 PDRB Kelompok Pertanian Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2014 – 2018 19

Tabel 2.4 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (juta rupiah 2014 – 2018 20

Tabel 2.5 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung (%) 2014 – 2018 21

Tabel 2.6 Komposisi Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB sektor Pertanian menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung (%) 2014 – 2018 21

Tabel 2.7 Rumah Tangga Perikanan/ Perusahaan Perikanan (RTPP) Lampung Tahun, 2014 – 2018 25

Tabel 2.8 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), dan Jumlah Pembudidaya Ikan Tahun 2014 – 2018..... 25

Tabel 2.9 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan di Prov. Lampung …….. 29

Tabel 2.10 Jumlah Pokmaswas dan Anggota Pokmaswas berdasarkan kabupaten /kota di Provinsi Lampung tahun 2018 29

Tabel 2.11 Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2021. 30

Tabel 2.12 Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Lampung, 2020 31

Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, (T-C.23) 31

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan 34

Tabel 4.1 Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran ... 49

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C 25) 50

Tabel 5.1 Analisis SWOT 53

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (t-c 26)..... 54

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (T-C 28) 65

Tabel 7.2 Cara perhitungan capaian indikator kinerja pembangunan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung 66

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung .. 10

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%), 2014 – 2018 22

Gambar 2.3 Produksi Perikanan Tangkap Prov. Lampung Thn 2014 – 2020 (ton) 23

Gambar 2.4 Produksi Perikanan Budidaya Prov. Lampung Thn 2014 – 2020 (ton) 24

Gambar 2.5 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung, 2017 - 2018 26

Gambar 2.6 Perkembangan NTP Umum, NTP Perikanan Tangkap (NTN) dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) Provinsi Lampung, Januari 2015 – Februari 2019 27

Gambar 2.7 Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Prov. Lampung (kg/kap/th) 38

Gambar 3.1 Peta Kawasan Pemanfaatan Umum 46

Gambar 3.2 Peta Kawasan Konservasi 46

Gambar 3.3 Peta Kawasan Strategis Nasional Tertentu 47

Gambar 3.4 Peta Alur Laut 48

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengalihan kewenangan yang disertai dengan pengalihan sumber keuangan kepada pemerintahan daerah tentunya berimplikasi pula pada tanggung jawab yang besar bagi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Salah satu kunci keberhasilan dari proses pembangunan di daerah adalah proses perencanaan. Untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan, Pemerintah telah menetapkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan kegiatannya harus memenuhi asas perencanaan yang baik. Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki acuan, arahan dan sasaran yang jelas baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh OPD dan menjadi panduan arah kebijakan pembangunan adalah Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 maupun RPJMN Pemerintah Pusat yang sedapat mungkin selaras dan mendukung target-target nasional. Renstra OPD tersebut menjadi dasar dalam penentuan rencana kinerja tahunan termasuk target/indikator kinerja dan alokasi anggaran.

Pada September 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan UU nomor 32 Tahun 2004. Salah satu perubahan besar dalam UU Pemda yang baru adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi, termasuk kewenangan dibidang kelautan dan pengawasan. Tindak lanjut dari pemberlakuan UU Pemda tersebut, Pemerintah Daerah menyusun ketentuan terkait Perangkat Daerah yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan. Ketentuan tersebut berupa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, yang diturunkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Untuk melaksanakan UU Nomor 23 tahun 2014, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang sudah dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Konsekuensi dari penerbitan ketiga peraturan tersebut, terjadi perubahan yang cukup besar dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah karena mengatur hingga nomeklatur program, kegiatan dan subkegiatan per urusan yang harus diimplementasikan seluruh Indonesia.

Selain terkait dengan perubahan Peraturan, pada tahun 2020, dunia termasuk Indonesia harus menghadapi pandemi yang diakibatkan Virus Covid-19. Virus Covid-19 menyebar dan menular dengan cepat serta bisa menyebabkan kematian. Untuk mengurangi potensi resiko penyebarannya, harus dilakukan adaptasi kebiasaan baru, hampir disemua sektor pembangunan dan aktifitas sehari-hari. Hal ini menyebabkan banyak perubahan dan memerlukan penyesuaian termasuk dalam pelaksanaan Program Pembangunan, Kebijakan Prioritas dan target-target indikator kinerja utama. Kedua kondisi tersebut menjadi pertimbangan utama perlunya dilakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan 2019 – 2024.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
16. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024.
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung pada periode 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan Dan Perikanan
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 80 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung dan telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok, yaitu :

1. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan deradikasi penyakit ikan didarat;
4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi;

8. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
9. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
10. Pelayanan administratif; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi sebagaimana Pergub Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Pergub Nomor 31 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
   3) Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahi:
   1) Seksi Tata Ruang,
   2) Seksi Jasa Kelautan dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
   3) Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
4. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
   1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
   2) Seksi Penangkapan Ikan dan Kenelayanan; dan
   3) Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
5. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing, membawahi :
   1) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
   2) Seksi Pengendalian Kesehatan, Pakan dan Obat Ikan; dan
   3) Seksi Penguatan Daya Saing.
6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
   1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan,
   2) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; dan
   3) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum

7. Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD)terdiri dari :
   1) UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
   2) UPTD Perbenihan Ikan Kelas A;
   3) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Kelas A;
   4) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas Kelas A;
   5) UPTD Pelabuhan Perikan Kota Agung Kelas A;
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya

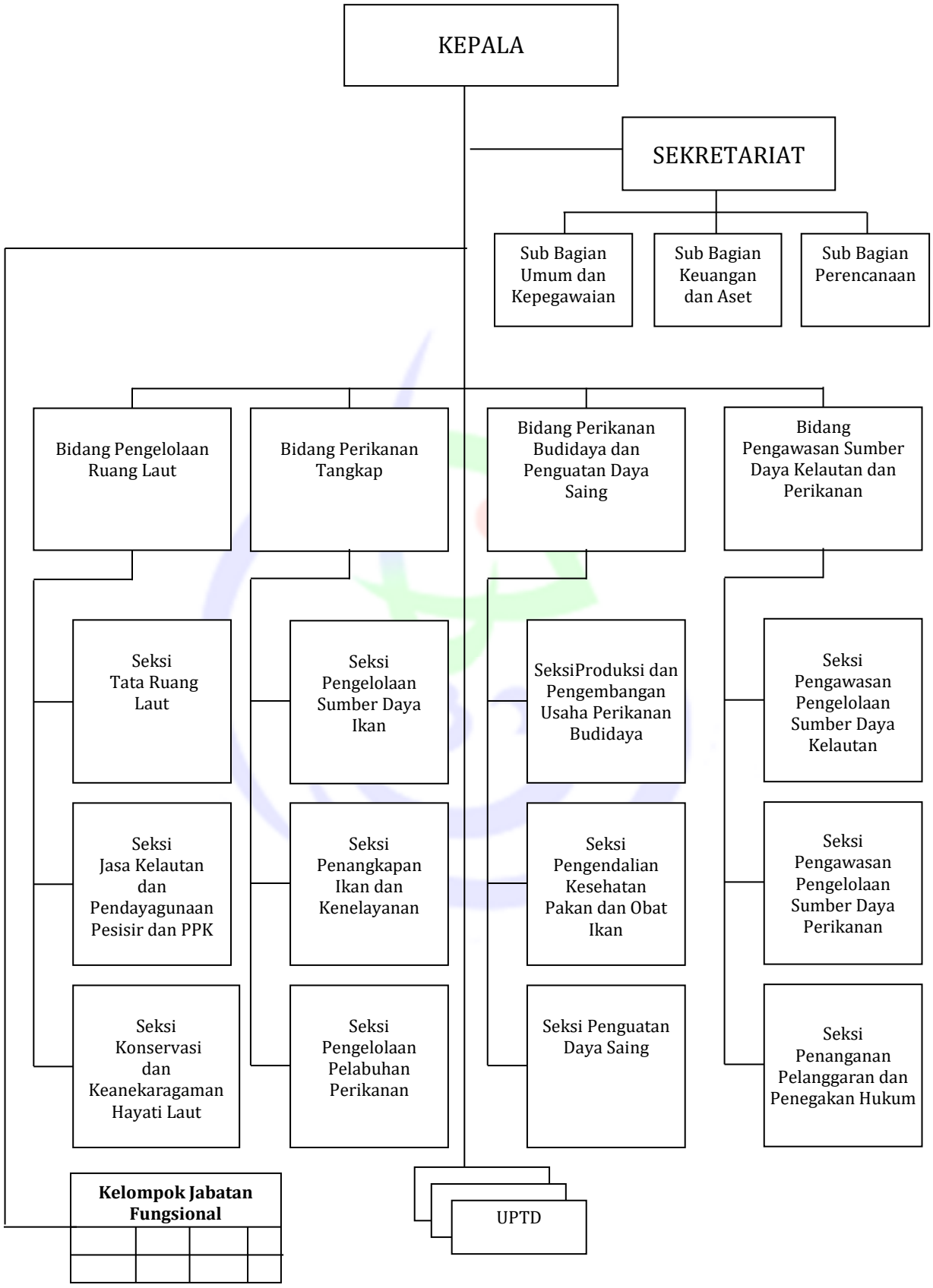

Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yaitu :

1. Kepala Dinas
   a) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
   b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:
      a. perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapanlokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
      b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin,dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
      c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan

penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

a) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan tehnis administrasi umum, organisasi, tata laksana, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas bidang.

b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, tata laksana, perlengkapan dan peraturan perundang-undangan;
d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut

a) Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pertimbangan teknis pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman hayati.

b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai fungsi:

a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pertimbangan teknis dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil;
d. Membentuk unit layanan pengelolaan kawasan konservasi pada lokasi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur
e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan ruang laut; dan
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

4. Bidang Perikanan Tangkap

a) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, kenelayanan, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan, penerbitan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (Lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan perikanan tangkap;
b. Pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap;
c. Pemberian bimbingan teknis dan monitoring perikanan tangkap;
d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap;
e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

5. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing,

a) Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

budidaya perikanan dan penguatan daya saing, produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing mempunyai Fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing. Produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
c. Pemberian bimbingan teknis dan monitoring di perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelanjutan dan perikanan;
d. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, industrialisasi pengolahan perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,

a) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana, penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumberdaya kelauta dan perikanan;
c. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;

d. pelaksanaan operasi pengawasan dan penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
e. pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan;
f. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan IUU-Fishing dan *Destructive Fishing*;
g. membentuk dan membina gugus tugas lapangan dengan melibatkan unsur Dinas Perikanan Kabupaten/Kota atau yang membidangi;
h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
   a) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
   b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, UPTD mempunyai fungsi:
      a. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan;
      b. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
      c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

Jenis pelayanan yang menjadi tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sesuai amanat Pasal 3 Pergub Provinsi Lampung Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, yaitu :

a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
b. penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;

c. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
d. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
e. pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
f. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
g. pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi;
h. pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
i. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
j. pelayanan administratif

Adapun kelompok sasaran yang menjadi tanggung jawab pelayanan DKP Provinsi Lampung adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dunia usaha perikanan, LSM, dan kelompok *stakeholder* lainnya.

2.2 SUMBERDAYA

2.2.1 SUMBERDAYA ALAM

Provinsi Lampung memiliki luas total wilayah 60.200,9km^2, dengan luas areal daratan seluas 35.376,5 km^2 atau 58,8% dan perairan laut (12 mil) seluas 24.820 km^2 atau 41,2%. Provinsi Lampung memiliki daerah pesisir seluas 440.010 hektar dengan garis pantai sepanjang 950 km. Provinsi Lampung memiliki 132 pulau-pulau kecil dan memiliki 2 (dua) teluk besar yaitu Teluk Semangka dan Teluk Lampung. Potensi alam lainnya adalah 6 (enam) sungai besar, yaitu :

- Way Sekampung: 256 km
- Way Semangka: 90 km
- Way Seputih: 190 km
- Way Jepara: 50 km
- Way Tulang Bawang: 136 km
- Way Mesuji: 220 km

Sehingga luas daerah tangkapan perairan air tawar di seluruh Provinsi Lampung adalah seluas 17.807 km^2.

Gambaran cakupan pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung tersebar 8 (delapan) kabupaten/kota, seperti pada **Tabel 2.1** dibawah ini.

Tabel 2.1 Potensi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Jumlah Desa Pesisir	Panjang Pantai (km)
1	Lampung Selatan	41	26	247,76
2	Bandar Lampung	2	26	27,01
3	Lampung Timur	5	17	108
4	Pesawaran	38	18	96
5	Lampung Tengah (Perairan Sungai/Muara)	-	9	-
6	Pesisir Barat	3	99	210
7	Tulang Bawang		22	51,9
8	Tanggamus	43	46	210
	Jumlah	**132**	**263**	**950,67**

Sumber : Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K

Dilihat pada tabel di atas, Kabupaten Tanggamus memiliki pulau terbanyak yaitu 43 buah dengan 46 desa pesisir. Sedangkan Lampung Selatan memiliki garis panjang pantai terpanjang yaitu 247,76 km.

2.2.2 SUMBERDAYA APARATUR

Jumlah pegawai pada Semester I tahun 2019 secara keseluruhan berjumlah 141 orang dengan rincian sebagaimana tertera pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

No	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Jumlah
a.	**Berdasarkan Jenis Kelamin**	
	1. Laki-laki	89
	2. Perempuan	52
b.	**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**	
	1. Pasca Sarjana (S3)	0
	2. Pasca Sarjana (S2)	38
	3. Sarjana (S1)	47
	4. D IV	4
	5. D III/Sarjana Muda	8
	6. SLTA Sederajat	37

No	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Jumlah
	7. SLTP Sederajat	3
	8. SD	3
c.	**Berdasarkan Golongan**	
	1. IV d	0
	2. IV c	0
	3. IV b	8
	4. IV a	16
	5. III d	35
	6. III c	26
	7. III b	24
	8. III a	5
	9. II d	9
	10. II c	7
	11. II b	5
	12. II a	3
	13. I d	0
	14. I c	3
	15. I b	0
d.	**Berdasarkan Jabatan Struktural**	
	1. Pejabat Eselon II	1
	2. Pejabat Eselon III	10
	3. Pejabat Eselon IV	28

2.2.3 SARANA PENDUKUNG

Sarana pendukung yang dimiliki dinas adalah berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, serta aset dokumen kearsipan. Secara umum, aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dapat diuraikan berikut ini :

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau Pelabuhan Perikanan Type C. Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) PPP berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 12 Tahun 2004 yaitu :
   1) PPP Lempasing di Kota Bandar Lampung
   2) PPP Kota Agung di Kabupaten Tanggamus
   3) PPP Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur
   4) PPP Teladas di Kabupaten Tulang Bawang
2. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) di Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. BBIS tersebut didukung oleh Balai Benih Ikan Lokal serta dempond yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Saat ini sedang dalam proses pembangunan Balai Budidaya

Perikanan Air Laut dan Payau yang berlokasi di Kota Agung, Tanggamus untuk komoditas perikanan air laut (lobster) dan payau (udang).

3. Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Hasil Perikanan (LPPHP)
4. Pasar Ikan Higienis
5. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis
6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)
7. Kawasan Konservasi Perairan
8. Sarana operasional berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

Tabel 2.3 Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah	40	Baik	Sarpras operasional dinas dan 5 UPTD
2	Peralatan dan Mesin	1.076	Baik	Sarpras operasional dinas dan 5 UPTD
3	Gedung dan Bangunan	126	Baik	Sarpras operasional dinas dan 5 UPTD
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	43	Baik	Sarpras operasional dinas dan 5 UPTD
5	Aset tetap lainnya			

2.3 KINERJA DAN PELAYANAN OPD

Untuk melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kinerja dan pelayanan OPD sebagaimana yang tercantum dalam renstra, maka dilakukan evaluasi secara periodik terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. PDRB Sektor Pertanian dan subsektor Perikanan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Sektor perikanan berkontribusi dalam kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk menggambarkan perkembangan PDRB dari tahun ketahun digunakan data PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, dengan data 2014 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.4 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2014 - 2018.

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1. Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	a. Tanaman Pangan/Food Crops	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	b. Tanaman Hortikultura/Horticulture Crops	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	c. Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	d. Peternakan/Livestock	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/Agriculture Services and Hunting	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3. Perikanan/Fishery	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018 (BPS, 2019).

Kontribusi (*share*) sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung terbesar dibandingkan dengan sektor yang lain. Pada tahun 2014, sektor Pertanian berkontribusi 62,5 triliun rupiah atau menyumbang 32,42% dari PDRB ADHK Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha. Pada tahun 2018 diperkirakan menjadi 66,9 triliun rupiah atau menurun secara kontribusi menjadi sebesar 28,84%, sedangkan industri pengolahan berkontribusi sebanyak 18,62%. Data ini menjadi catatan penting agar pemerintah meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, termasuk perikanan sehingga kontribusi masing-masing sektor lebih proporsional. Dengan adanya nilai tambah pengolahan di lokasi sentra pertanian, selanjutnya akan meningkatkan PDRB Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Tabel 2.5. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Lampung (%), 2014 – 2018.

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry &Fishing**	**32,45**	**31,95**	**31,33**	**30,05**	**28,84**
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	25,48	25,18	24,71	23,45	22,75
	a. Tanaman Pangan/Food Crops	10,27	10,16	9,61	10,02	9,60
	b. Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	2,76	2,70	2,64	1,85	1,71
	c. Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	7,62	7,56	7,33	6,76	6,64
	d. Peternakan/Livestock	4,06	4,02	4,02	4,16	4,16
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/Agriculture Services and Hunting	0,74	0,74	0,71	0,67	0,63
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	0,36	0,37	0,38	0,36	0,34
	3. Perikanan/Fishery	6,61	6,39	6,24	6,25	5,75

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, (BPS, 2019).

Sektor Pertanian meliputi beberapa subsektor, yaitu 1). Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa Pertanian; 2). Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan 3). Perikanan. Kontribusi masing-masing subsektor dalam nilai PDRB sektor pertanian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Komposisi subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB Sektor Pertanian menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Lampung (%), 2014 – 2018.

	Lapangan Usaha / Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	79,01	79,44	79,80	78,98	78,76
	a. Tanaman Pangan/Food Crops	33,70	34,75	34,91	36,61	37,48
	b. Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	8,04	8,37	8,71	6,31	5,88
	c. Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	22,80	21,94	21,03	20,13	19,98
	d. Peternakan/Livestock	11,94	11,99	12,50	13,59	14,16
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/Agriculture Services and Hunting	2,43	2,70	2,66	2,84	2,50
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	1,20	1,34	1,54	1,54	1,51
3	Perikanan/Fishery	19,79	19,22	18,66	19,48	19,73
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, (BPS, 2019).

Berdasarkan Tabel 2.5. diatas, Subsektor Pertanian yang meliputi pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Sektor Pertanian sebesar 79,01% pada tahun 2014 kemudian meningkatan menjadi 79,76%** pada tahun 2018. Sedangkan subsektor perikanan berada pada urutan kedua, menyumbang 19,79% pada tahun 2014, menurun menjadi 18,73%** pada tahun 2018. Tren penurunan tersebut lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut ini;

Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%), 2014 – 2018.

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, (BPS, 2019).

Meskipun peranannya terlihat stabil ditiap tahunnya, pertumbuhan sektor pertanian mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir, khususnya subsektor pertanian. Bahkan berdasarkan Gambar 2.2. diatas, subsektor perikanan mengalami tren penurunan terbesar hingga -3,08% pada tahun 2018. Tren penurunan ini terkonfirmasi dengan tren penurunan produksi perikanan secara umum.

2. Produksi Perikanan

Tingkat kontribusi dan pertumbuhan Subsektor Perikanan ditunjukkan dengan perkembangan produksi perikanan di Provinsi Lampung. Sumber produksi perikanan Lampung berasal dari Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Untuk perikanan tangkap selama tujuh tahun terakhir, 2014-2020 tingkat produksinya mengalami fluktuasi.

Data produksi perikanan tangkap diperoleh dari penjumlahan data-data produksi kabupaten/kota yang memiliki kawasan perairan laut dan nelayan serta hasil tangkapan dari perairan umum seperti sungai, waduk, danau dan rawa-rawa. Perkembangan produksi

perikanan tangkap sebagaimana **Gambar 2.3**. dibawah ini:

Gambar 2.3. Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2014-2020 (ton)

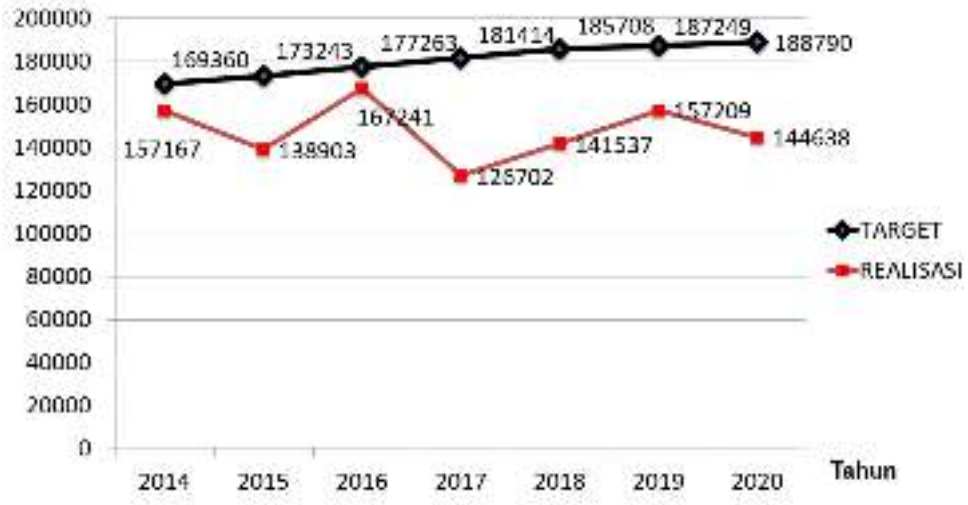

*Sumber : LDA Lampung, 2014 – 2020; *Statistik Satu Data KKP*

Berdasarkan grafik diatas, produksi perikanan tangkap di Provinsi Lampung sangat berfluktuasi dengan kecenderungan naik sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2014 produksi perikanan tangkap mencapai 157.167 ton, mengalami fluktuasi relatif besar hingga menjadi 157.209 ton pada tahun 2019. Pada tahun 2020 turun cukup drastis menjadi 144.638 ton. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi produksi perikanan tangkap tersebut, antara lain: faktor cuaca dan musim penangkapan yang mempengaruhi hasil tangkapan dan hari penangkapan nelayan, kebijakan pelarangan dan penggantian alat tangkap, termasuk perubahan sistem pengelolaan statistik perikanan (kebijakan/ aplikasi satu data). Khusus ditahun 2020, faktor pandemi Covid 19 cukup mempengaruhi karena membatasi aktifitas dan distribusi, serta penurunan daya beli masyarakat. Pengembangan usaha perikanan tangkap akan optimal jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain mencakup: kapal dan alat tangkap, pelabuhan perikanan beserta fasilitasnya; serta perlu ditingkatkan Integrasi dan konektivitas antar pelabuhan perikanan belum optimal, termasuk sistem data dan informasi.

Selain hasil produksi perikanan tangkap, produksi perikanan juga berasal dari hasil produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksinya juga mengalami fluktuasi sebagaimana **Gambar 2.4**.

Gambar 2.4. Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Lampung Tahun 2014-2020 (ton)

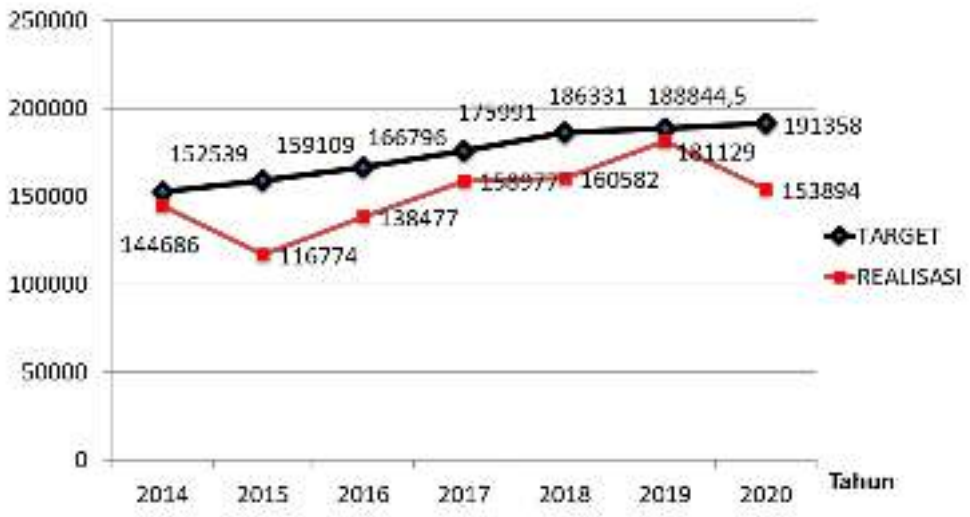

*Sumber : LDA BPS Lampung, 2014 – 2020; *Statistik Satu Data KKP*

Berdasarkan grafik diatas, produksi perikanan budidaya di Provinsi Lampung cukup berfluktuasi dengan kecenderungan naik sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2014 produksi perikanan budidaya mencapai 144.686 ton, kemudian menurun cukup besar (19%) pada tahun 2015 menjadi sebesar 116.774 ton. Hal ini antara lain disebabkan permasalahan di tambak ex Dipasena yang tidak lagi berlanjut. Kemudian pada tahun berikutnya mulai meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 181.129 ton. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan ditahun 2019 capaian kinerja produksi perikanan budidaya mencapai 95,91%. Namun pada tahun 2020, mengalami penurunan cukup dratis hingga menjadi 153.894 ton atau 84,96% dari produksi tahun 2019. Faktor pandemi Covid 19 cukup mempengaruhi karena membatasi aktifitas kegiatan yang menjadi permintaan utama komoditas budidaya, seperti warung makan dan usaha catering, serta penurunan daya beli masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya pada renstra 2019 – 2024 antara lain, revitalisasi/ pendampingan untuk mengembalikan produksi dan pengolahan di kawasan tambak ex Dipasena dan Bratasena, peningkatan produksi benih unggul dan berkualitas, pengembangan komoditas unggulan dan komoditas endemik serta pengembangan budidaya laut dan rumput laut.

3. Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan Tangkap (RTPP)

Provinsi Lampung memiliki garis pantai sepanjang ±950km dan luas wilayah perairan pesisir kurang lebih ±24.820km^2. Dengan potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, maka banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya pada subsektor tersebut. Rumah Tangga Perikanan adalah rumah tangga yang mata pencaharian dan jenis kegiatan usahanya bergerak pada subsektor perikanan. Rumah Tangga Perikanan terbagai dalam beberapa jenis, yaitu RTPP Perikanan Budidaya, RTPP Pembudidaya, RTPP Nelayan Perikanan Laut, RTPP Nelayan Perairan Umum. RTPP Pembudidaya adalah RTPP dengan jumlah terbanyak, sedangkan RTPP Nelayan Perairan Umum adalah RTPP dengan jumlah paling sedikit. Kondisi RTPP Perikanan Tangkap dan Nelayan di Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2009-2013 disajikan pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7. Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTPP) Lampung Tahun 2014-2018

Tahun	RTP/P Nelayan Perikanan (Orang)	
	Perairan Laut	Perairan Umum
2014	7.771	5.677
2015	7.761	5.236
2016	7.443	10.434
2017	16.592	2.374

Sumber : LDA BPS Lampung, 2014 - 2019

Sementara itu jumlah RTPP Pembudidaya Ikan pada tahun 2014 sebanyak 53.060 Orang, dan hingga menjelang akhir tahun 2017 jumlah naik sekitar 55.348 Orang.

Tabel 2.8. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Jumlah Pembudidaya Ikan Tahun 2014-2018

Tahun	Pembudidaya Ikan (Orang)
2014	53.060
2015	46.232
2016	55.248
2017	55.348

Sumber : LDA BPS Lampung, 2014 - 2019

Untuk meningkatkan validitas data pelaku usaha di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggulirkan program satu data KKP dan Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) mulai tahun 2016. Program tersebut bekerja sama dengan Penyuluh Perikanan

PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang ada di seluruh Kabupaten/kota se Indoensia untuk mendata by name by addres seluruh pelaku usaha perikanan yang ada. Selanjutnya data tersebut menjadi *database* yang mendukung pengelolaan data statistik dan program bantuan pemerintah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Nilai Tukar Petani (NTP) Perikanan

Indikator perubahan harga yang digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli petani sebagai produsen di daerah pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Secara konseptual, NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi pertanian. NTP tersebut dapat dijabarkan lebih spesifik per subsektor. Untuk subsektor perikanan, umumnya menggunakan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi). Gambaran umum Nilai Tukar Petani dan masing-masing sub sektornya sebagai mana pada Gambar 2.5. berikut ini:

Gambar 2.5. Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung, 2017 – 2018.

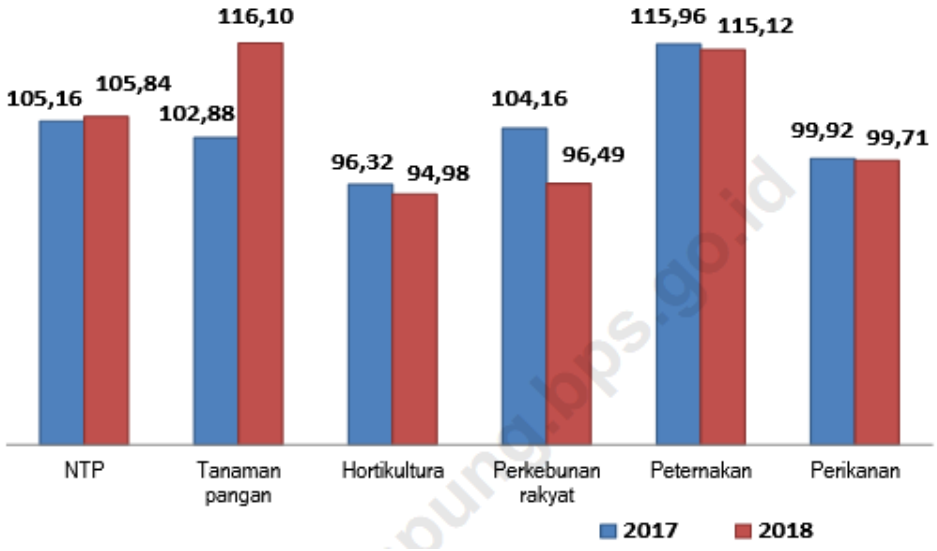

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Lampung 2018 (BPS, 2019)

Secara total, NTP berada pada level cukup dengan nilai rata-rata pada tahun 2018 sebesar 105,84. Namun jika dilihat lebih rinci menurut sub sektor, ternyata tidak seluruhnya mengalami surplus. Surplus hanya dialami petani pada sub sektor tanaman pangan dan peternakan, sementara petani pada sub sektor tanaman hortikultura, perkebunan rakyat dan perikanan tidak mengalami surplus. Pada tahun 2020, Nilai tukar subsektor perikanan yang dibedakan menjadi Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) mengalami perubahan komposisi, dengan nilai keduanya diatas 100..

Komposisi masing-masing nilai tukar pada tahun 2020 sebagai mana dalam Gambar 2.6. berikut:

NTP Subsektor	2020
Tanaman Pangan (NTP-P)	94,26
Hortikultura (NTP-H)	98,34
Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R)	93,25
Peternakan (NTP-Pt)	99,55
Perikanan Tangkap	101,35
Perikanan Budidaya	100,38
NTP	94,73

Gambar tabel 2.6. Nilai NTP Umum, dan NTP masing-masing Subsektor di Provinsi Lampung, Tahun 2020 (BPS Provinsi Lampung; 2020)

Berdasarkan Gambar diatas, terjadi penurunan NTP secara umum, khususnya disektor pertanian dan perkebunan, namun demikian NTP Perikanan Budidaya (NTPi) justru mengalami perbaikan dari 97,63 pada tahun 2015 menjadi 100,38 pada tahun 2020. Nilai NTP Perikanan Tangkap juga masih yang tertinggi diantara sektor pertanian, walaupun nilainya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menjadi catatan penting dan harus dicermati dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan berikutnya termasuk dalam penentuan prioritas pembiayaan. Untuk meningkatkan nilai NTP, pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap biaya-biaya input produksi agar lebih terjangkau sehingga meningkatkan daya saing produk pertanian secara luas. Salah satunya melalui Program Kartu Petani Berjaya yang menjadi unggulan Gubernur Ir. Arinal Djunaidi.

5. Konsumsi Ikan per Kapita

Ikan merupakan salah satu sumber makanan hewani yang sangat baik untuk anak dan ibu hamil karena memiliki kandungan protein tinggi. Tingkat konsumsi ikan masyarakat terus meningkat sejak 2014 hingga 2020 sebagaimana Gambar 2.7. berikut:

Gambar 2.7. Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Provinsi Lampung (kg/kapita/th)

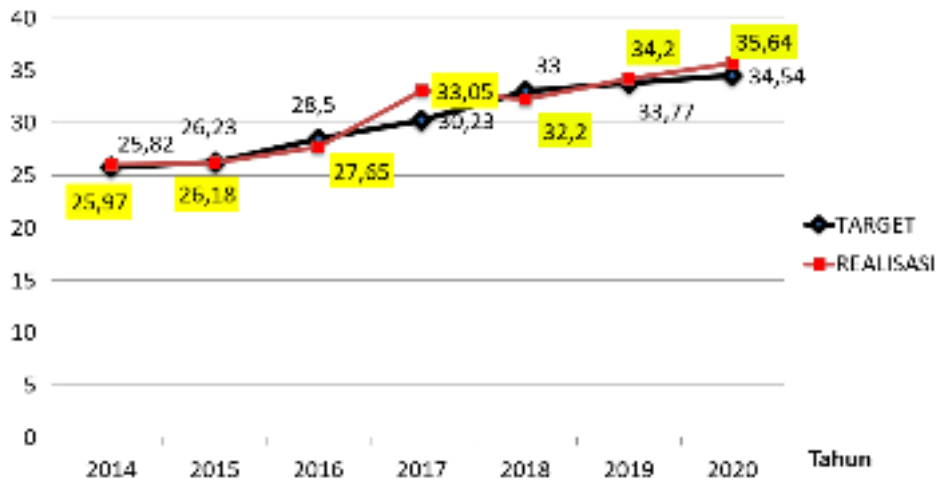

Sumber : Bidang PDS Dinas Kelautan dan Perikanan 2014 – 2020

Meskipun secara tren meningkat sejak tahun 2014, namun tingkat konsumsi ikan masyarakat Lampung masih jauh dari target dan capaian konsumsi ikan nasional. Pada tahun 2020 angka konsumsi ikan Provinsi Lampung mencapai 35,64kg/kap/thn sedangkan capaian nasional sudah sebesar 50,69 kg/kap/thn. Dari data tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu meningkatkan kampanye gerakan makan ikan (Gemarikan) dikabupaten/ kota, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk olahan termasuk meningkatkan ketersedian produksi ikan dengan harga yang kompetitif. Peningkatan angka konsumsi ikan menjadi penting dan strategis saat ini karena selain meningkatkan gizi dan sumber protein masyarakat sekaligus bagian dari penanganan stunting yang saat ini cukup menghawatirkan, termasuk di Provinsi Lampung.

6. Ekspor Impor Hasil Perikanan

Salah satu indikator kinerja keberhasilan pengelolaan sub sektor Kelautan dan Perikanan adalah dengan melihat kapasitas ekspor dari produk-produk pada sub sektor tersebut. Ekspor produk-produk perikanan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2014 - 2019 cenderung fluktuatif, sebagai mana terlihat pada Tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan di Provinsi Lampung

Tahun	Ekspor Produk Perikanan (Ton)	Nilai Ekspor Produk Perikanan (US$)
2014	25.438,33	351.156.310
2015	27.458,14	260.050.188
2016	26.476,67	228.370.141
2017	17.174,39	176.430.012
2018	18.054,33	178.984.087
2019	19.054,22	165.700.000
2020	17.487,84	262.030.000

Sumber : LDA BPS 2015 – 2020; BKIPM 2020.

Sejak tahun 2014, terjadi kecenderungan penurunan volume ekspor perikanan, dimana pada tahun 2020 ekspor perikanan Provinsi Lampung sebesar 17.487 ton, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 19.054 ton. Namun demikian, dari sisi nilai mengalami kenaikan sebesar 11% dibandingkan tahun 2019.

8. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pengawasan sumberdaya perikanan di Provinsi Lampung. Kegiatan ini melibatkan kelompok-kelompok masyarakat perikanan yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran Kelompok masyarakat pengawasan ini dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

Tabel 2.10. Jumlah Pokmaswas dan Anggota Pokmaswas Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Pokmaswas		Jumlah Anggota	
1	Pesisir Barat	1	Kelompok	13	Orang
2	Lampung Barat	1	Kelompok	10	Orang
3	Pesawaran	1	Kelompok	10	Orang
4	Kota Metro	1	Kelompok	15	Orang
5	Tulang Bawang	1	Kelompok	26	Orang
6	Lampung Timur	1	Kelompok	25	Orang
7	Lampung Selatan	1	Kelompok	10	Orang
Total		**7**	**Kelompok**	**109**	**Orang**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2018

Secara umum operasional pengawasan masyarakat di Provinsi Lampung belum berjalan dengan efektif karena terbatasnya sarana prasarana dan kemampuan (*skill*) anggota pokmas dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran di bidang perikanan, dan

rendahnya kemampuan kelompok pengawas dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana dibidang perikanan.

Selain itu, dalam rangka meminimalisir tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai 8 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan rincian 2 PPNS Daerah dan 5 PPNS Perikanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut PPNS Perikanan mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan, dan pesisir) yang terjadi di wilayah ZEEI.

Tabel 2.11. Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2021

No	Nama	No SKEP PPNS Menteri Hukum dan HAM	Keterangan
1	Sutaryono, A.Pi.	C-31 PW.07.03 Tahun 1994	PPNS Perikanan
2	Hermansyah	C-18.PW.07.03 Tahun 1994	PPNS Perikanan
3	Sukarsono, S.Pi.	C-45.HN.05.01 Tahun 2002	PPNS Perikanan
4	M. Aprizal Arsyita, S.St.Pi., M.H.	AHU-36.AH.09.01 Tahun 2013	PPNS Perikanan
5	Endarwan	C-62.HN.05.01 Tahun 2002	PPNS Perda
6	Heru Rochmadi, SE	C-07.HN.05.01 Tahun 2003	PPNS Perda
7	A. Faisal, A.Pi.	AHU-61.AH.09.01 Tahun 2008	PPNS Perda
8	Cici Anggara, S.Pi	2021	PPNS Perikanan

9. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

Konservasi merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan suatu wilayah atau sumberdaya ikan dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan keseimbangan sumberdaya ikan dan ekosistemnya di dalam suatu kawasan tertentu. Upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan Kawasan Konservasi Perairan baik perairan laut, pesisir maupun perairan tawar dan payau. Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi konservasi kawasan, jenis dan genetik. Provinsi Lampung memiliki 4 kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif dengan luas ± 162.637,9 Ha, dan masih ada ± 97.889,86 Ha yang belum terkelola (sebagaimana amanat Perda RZWP3K Provinsi Lampung). Kawasan Konservasi tersebut terdiri dari (1) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) Kab. Pesisir Barat (Ngambur dan Pulau

Betuah, seluas 15.459,68ha); (2) Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan seluas 72.211,68ha; (3) Kawasan Konservasi Perairan Way Kambas seluas 60.397,21ha; (4) Kawasan Konservasi Perairan Pulau Batang Segama lampung timur seluas 14.569,30ha.

Tabel 2.12. Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Lampung 2020

NO.	WPP	KABUPATEN	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	[illegible]		[illegible]	
					TH I	[illegible]	TH I	TH II
[illegible]	Provinsi Lampung							
1	[illegible]	Lampung Barat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-

Sumber : [illegible]

Selain itu, terdapat juga kawasan Cagar Alam Laut Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cagar Alam Laut terdapat pada dua lokasi yaitu Tanjung Keramat sepanjang 7 km di perbatasan Bengkulu seluas 1.500 ha dan wilayah perairan pantai dari Bengkunat sampai Tanjung Cina sepanjang 42 km meliputi kawasan seluas 20.000 ha.

Di perairan selat sunda terdapat Kawasan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau yang secara administrasi pemerintahan berada dalam Kabupaten Lampung Selatan. Penetapan kawasan cagar alam laut ini merupakan perluasan Cagar Alam Krakatau melalui SK Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/1990, tanggal 26 Februari 1990.Perairan cagar alam laut meliputi areal seluas 12.000 ha sedangkan luas daratannya adalah 2.535 ha, terdiri dari Krakatau Besar (Rakata), Krakatau Kecil (Panjang), Anak Krakatau dan Pulau Sertung. Gugus Krakatau ini juga telah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam sejak tahun 1919.

10. Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Realisasi Pendanaan.

Secara garis besar terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja yang dievaluasi, dengan 10 indikator terkait program kegiatan pembangunan dan 5 indikator pelayanan dan administrasi perangkat daerah. Tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.13. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (T-C.23)

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA					REALISASI PENCAPAIAN					RASIO PENCAPAIAN				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1). Produksi Hasil Perikanan Tangkap (ton)	173.248	177.264	181.414	185.708	190.155	138.903	167.241	126.702	141.537	**157.209**	80,2%	94,3%	69,8%	76,2%	***82,7%***
		2). Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113,72	113,86	114,00	114,15	114,29	105,84	106,76	110,00	117,54	**114,68**	93,1%	93,8%	96,5%	103,0%	***100,3%***
II.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1). Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	169.744	178.281	188.396	199.728	212.206	116.774	138.477	158.977	160.582	**181.129**	68,8%	77,7%	84,4%	80,4%	***85,4%***
		2). Jumlah benih dengan mutu terjamin (juta ekor)	10.634	11.485	12.404	13.396	14.468			11.849	12.208				95,5%	91,1%	
III.	Program Optimalisasi Pengelolaan, Pemasaran dan Mutu Produksi Perikanan	1). Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Juta US $)	303	315	328	341	355	260,05	228,37	176,43	178,98		85,8%	72,4%	53,8%	52,5%	
		2). Konsumsi Ikan penduduk (Kg/Kap/Thn)	26,23	28,50	30,23	31,57	33,57	26,18	27,65	33,05	32,20		99,8%	97,0%	109,3%	102,0%	
		3). Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ribu ton)	50,29	55,32	60,85	66,94	73,63			0,31	46,90				0,5%	70,1%	
IV.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1). Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolaannya (kawasan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	100%	200 %
		2). Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki perencanaan pengelolaan (lokasi)	2	2	2	2	2	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	50%	50%
V.	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Kepatuhan Para Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	5 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	12 lokasi	15 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	12 lokasi	15 lokasi	100%	100%	100%	100%	100 %
VI.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (orang)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
VII.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Administrasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
VIII.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sapras Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (1 Dinas, 4 UPTD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
IX.	Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Bidang Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (dok)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
X.	Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Sistem dan Jaringan Informasi kelautan dan Perikanan (kegiatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Berdasarkan Tabel diatas, sebagian besar indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, untuk indikator kinerja utama, yaitu produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan nilai ekspor hasil perikanan masih belum memenuhi target. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam perumusan program dan kegiatan pada Renstra berikutnya. Pengaruh musim dan pergantian alat tangkap diperkirakan menyebabkan fluktuasi produksi perikanan tangkap. Sedangkan menurunnya produksi perikanan budidaya terutama disebabkan menurunnya produksi udang Provinsi Lampung. Ada permasalahan terkait manajemen/ pengelolaan kawasan udang ex Dipasena dan Bratasena, ditambah dengan menurunnya daya dukung dan serangan penyakit maupun virus dikawasan tambak yang dulu sempat berjaya. Menurunnya produksi udang juga berimbas pada menurunnya ekspor hasil perikanan Lampung yang memang didominasi oleh komoditas jenis *penaeus* tersebut.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun 2019 – 2020, produksi perikanan Provinsi Lampung sebagai berikut:

INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR	
	2019	2020
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	157.209	144.638 *
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	181.129	153.638 *
Produksi Perikanan (Total)	**338.338**	**298.532 * (88,23 %)**

Volume produksi perikanan di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian di tahun 2019 dan hanya mencapai 88,23% jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 380.149. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi kegiatan ekonomi dan pelayanan kesehatan akibat terjadi pandemi yang disebabkan oleh virus Covid 19. Salah satu kebijakan dalam penanganan Pandemi adalah Penerapan "pembatasan sosial", yang secara tidak langsung menyebabkan penurunan permintaan hasil produksi perikanan baik pasar di pasar lokal maupun luar daerah, akibat adanya pembatasan kegiatan pemasaran, kegiatan pertemuan, restoran/ rumah makan. Hal ini diperparah dengan penurunan daya beli masyarakat. Menurunnya permintaan berimbas pada berkurangnya siklus produksi pembudidaya ikan dan pada akhirnya produksi perikanan secara umum.

Penanganan pandemi baik di Indonesia maupun dunia masih memerlukan waktu yang cukup lama dalam beberapa tahun kedepan. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian target-target kinerja dengan

mempertimbangkan perkembangan penanganan Covid di Indonesia, kebijakan refocusing anggaran dan prediksi pemulihan ekonomi daerah khususnya disektor kelautan dan perikanan.

Pencapaian kinerja juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dalam mendukung program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam kondisi yang normal, program dan kegiatan yang sudah direncanakan mendapat alokasi pagu yang sesuai sehingga indikator kinerja yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Kondisi yang lebih ideal apabila indikator kinerja tercapai meskipun alokasi pendanaan lebih kecil dari yang direncanakan. Realisasi pendanaan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan pemerintah daerah secara umum. Berikut ini adalah Tabel Rencana Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Renstra 2015 – 2019 yang nilai realisasinya diambil setelah APBD Perubahan setiap tahunnya.

Tabel 2.14. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan (T-C.24)

No	Uraian / Program	Anggaran Renstra (Rp.000)					Realisasi DPA (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Ang.	Rea-lisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I.	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	3.588.070	4.650.000	4.790.000	6.500.000	6.617.244	5.336.241	6.282.589	25.224.052	4.502.703	5.201.137	149%	135%	527%	69%	79%	29,6%	NA
II.	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	4.864.320	5.042.312	5.150.312	5.329.008	5.400.500	8.536.730	2.110.105	2.317.800	1.123.721	1.354.487	175%	42%	45%	21%	25%	3,66%	NA
III.	**Program Optimalisasi Pengelolaan, Pemasaran dan Mutu Produksi Perikanan**	4.415.000	4.600.000	4.750.000	4.237.000	4.340.242	3.104.765	1.295.195	1.600.000	659.000	496.345	70%	28%	34%	16%	11%	4,19%	NA
IV.	**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**	5.100.000	5.300.000	5.500.000	5.550.000	5.500.000	5.383.616	3.846.200	2.699.500	1.033.856	907.345	106%	73%	49%	19%	16%	3,92%	NA
V.	**Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut**	200.000	1.050.000	1.470.000	1.764.000	2.116.800	929.135	1.493.176	1.229.840	607.100	189.065	465%	142%	84%	34%	9%	40,%	NA
VI.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	119.250	122.827	126.512	128.500	134.216	170.290	0	225.000	94.100	0	143%	0%	178%	73%	0%	3,0%	NA
VII.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.387.610	2.459.238	2.533.015	2.600.000	2.687.276	3.561.317	4.708.300	3.200.300	2.245.214	1.960.781	149%	191%	126%	86%	73%	3,0%	NA
VIII.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	595.750	613.623	632.031	650.992	670.522	766.186	1.605.502	433.998	98.850	81.173	129%	262%	69%	15%	12%	3,0%	NA
IX.	**Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring Bidang Kelautan dan Perikanan**	400.000	650.000	730.000	850.000	900.000	431.396	716.593	550.380	120.368	125.916	108%	110%	75%	14%	14%	62,5%	NA
X.	**Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan**	1.330.000	350.000	488.130	370.000	400.000	1.315.714	1.125.340	1.023.130	0	54.500	99%	322%	210%	0%	14%	39,47%	NA
	Total	23.000.000	24.838.000	26.170.000	27.979.500	28.766.800	29.535.390	23.183.000	38.504.000	10.484.912	10.370.749	128%	93%	147%	37%	36%	7,99%	NA

Berdasarkan Tabel diatas, sampai dengan tahun 2017, realisasi pendanaan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satker nilainya tidak jauh dari yang direncanakan dalam Renstra maupun renja, bahkan pada tahun 2017 rasionya mencapai 147% dari rencana anggaran yang ditetapkan dengan proporsi terbesar pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan. Program Pengembangan Perikanan Tangkap umumnya mendapat alokasi Dana Transfer Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor kelautan dan perikanan untuk pembangunan pelabuhan perikanan di daerah.

Namun di 2 tahun terakhir RPJMD, realisasi pendanaan menurun drastis, terutama setelah ditetapkannya APBD Perubahan tahun berjalan. Pada tahun 2018 dan 2019, pemerintah daerah terpaksa menerapkan kebijakan efisiensi untuk menutupi defisit anggaran akibat tidak terpenuhinya target pendapatan. Bahkan ditahun 2019, pemerintah daerah harus menghadapi defisit 1,7 triliun akibat kebijakan hutang untuk pembangunan fisik, hutang dana bagi hasil kepada pemerintah kab/kota dan berkurangnya dana transfer pusat. Hal ini berimbas juga pada alokasi APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan dimana setelah penetapan APBD Perubahan TA. 2019 anggaran satker mengalami efisiensi sebesar -73% dari anggaran awal sebesar Rp.38.943.749.000,- menjadi hanya sebesar Rp.10.370.749.000,-

Dinamika pendanaan dan kondisi keuangan pemerintah daerah harus menjadi perhatian bersama dalam pengusulan pagu indikatif program dan kegiatan. Masing-masing bidang dan UPTD agar cermat menghitung kebutuhan belanja kegiatan, menetapkan prioritas dan fokus pada pencapaian indikator kinerja utama. Efisiensi dan efektifitas serta strategi kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan harus diperhatikan agar pencapaian indikator kinerja tidak harus membutuhkan atau tergantung pada pendanaan yang besar. Selain itu mencari sumber-sumber pendanaan diluar APBD seperti DAK, CSR maupun Swasta melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) perlu dipertimbangkan untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sejauh ini berdasarkan data di atas masih perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dinamika di lapangan dan masyarakat terus berkembang sehingga menciptakan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan. Tantangan yang muncul diantaranya adalah:

1. Permasalahan kenelayanan; masih sedikitnya nelayan yang mendapat jaminan asuransi nelayan. Selain itu kurang dari 10% nelayan yang sudah memiliki dokumen kapal.
2. Penurunan produksi komoditas unggulan perikanan budidaya, antara lain udang, kerapu dan rumput laut.
3. Penataan kawasan tambak yang masih terbatas, persoalan pengelolaan kawasan tambak baik intensif maupun tradisional yang tidak optimal, penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan serta ancaman serangan penyakit.
4. Penataan perizinan dan pemanfaatan alokasi ruang laut yang masih menemui beberapa kendala
5. Penambahan kewenangan provinsi berdasarkan UU 23 tahun 2014 dibidang kelautan dan perikanan tidak didukung dengan penambahan alokasi anggaran, SDM dan sarana prasarana yang memadai.
6. Keterbatasan SDM, sarana prasarana dan anggaran untuk melaksanakan pengawasan di 15 Kabupaten/kota, mulai dari hulu – hilir termasuk IUU fishing, penegakan Perda RZWP3K, patroli laut dan pemeliharaan kapal/ speedboat pengawasan
7. Kondisi stagnan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung karena keterbatasan anggaran dan belum jelasnya status peralihan P3D aset-aset pelabuhan yang sebelumnya dibangun dan dikelola oleh kabupaten/kota.
8. Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang sudah dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dikhawatirkan membatasi inovasi dan kemampuan daerah dalam menangani permasalahan yang selalu berkembang didaerah.

Tantangan diatas diimbangi dengan peluang yang ada :

1. Adanya landasan hukum yang kuat terkait pembangunan kelautan perikanan, antara lain :
   a. UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
   b. UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;
   c. UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
   d. Undang-undang Tahun 2014 tentang Kelautan
   e. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
   f. Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2. Provinsi Lampung memiliki wilayah perairan dan potensi perikanan darat dan laut yang masih belum termanfaatkan secara optimal;
3. Sektor perikanan menjadi salah prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2019 – 2024 melalui janji kerja Nelayan Berjaya.
4. Meningkatnya dukungan pusat dan DPR RI dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan di daerah termasuk pengembangan kawasan industri maritim
5. Meningkatnya pengembangan wisata bahari dapat bersinergi dalam pengembangan ekonomi wilayah pesisir.
6. Bertambahnya kewenangan Provinsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan perairan dan wilayah pesisir.

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Berdasarkan penelaahan data dan rangkuman isu/permasalahan terkini di Provinsi Lampung, diidentifikasi beberapa permasalahan sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Terjadinya wabah covid-19 di dunia juga berdampak disektor kelautan dan perikanan, antara lain sebagai berikut :
   a) Penurunan permintaan produk ekspor hasil perikanan Provinsi Lampung, sehingga menyebabkan Stock Produk di Unit Pengolahan Ikan (UPI) menumpuk.
   b) Penurunan permintaan hasil produksi perikanan baik pasar di pasar lokal maupun luar daerah, hal ini disebabkan terutama penurunan daya beli masyarakat, pembatasan kegiatan pemasaran, kegiatan pertemuan, dan penerapan pembatasan akses masuk kedaerah lain.
   c) Menurunnya permintaan berimbas pada berkurangnya siklus produksi pembudidaya ikan dan pada akhirnya produksi perikanan secara umum.
   d) Penerapan “pembatasan sosial” juga berpengaruh pada penyediaan sarana budidaya (benih dan pakan) dan jalur distribusinya.
2. Dukungan sektor kelautan dan perikanan dalam Program Kartu Petani Berjaya masih belum optimal, baik dari sisi integrasi program, menu dalam aplikasi maupun kepesertaan pelaku utama kelautan dan perikanan dalam Program KPB.
3. Dinamika/perubahan kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan di Pusat, dengan adanya UU Cipta Kerja, pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan menyebabkan dinamika dalam kebijakan, program dan kegiatan kelautan dan perikanan yang perlu disesuaikan oleh daerah.
4. Trend nilai tukar pembudidaya (NTPi) di Provinsi Lampung masih dibawah 100, hal ini mengindikasikan kegiatan perikanan budidaya secara umum

belum memberikan keuntungan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

5. Penataan kawasan tambak yang masih terbatas, persoalan pengelolaan kawasan tambak baik intensif maupun tradisional yang tidak optimal, penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan serta ancaman serangan penyakit.
6. Masih sangat sedikit kapal perikanan di Provinsi Lampung yang memiliki perizinan (5% dari 10.121). Kondisi ini terutama disebabkan pengurusan dokumen kapal yang melibatkan instansi lain (KSOP) memiliki SDM yang bertugas mengukur kapal hanya 2 (dua) orang untuk 1 (satu) Provinsi Lampung.
7. Penataan perizinan dan pemanfaatan alokasi ruang laut yang masih menemui beberapa kendala antara lain masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk mengurus perizinan, perkembangan alokasi dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana awal.
8. Penambahan kewenangan provinsi berdasarkan UU 23/2014 dibidang kelautan dan perikanan tidak didukung dengan penambahan alokasi anggaran, SDM dan sarana prasarana yang memadai, terutama dalam aspek pengawasan SD Kelautan dan Perikanan.
9. Penerapan sistem rantai dingin dalam menjaga mutu hasil perikanan belum optimal. Keterbatasan kewenangan dan anggaran Pemerintah Provinsi, sarana dan prasarana yang belum mendukung dan tidak terintegrasi.
10. Permasalahan sampah pesisir harus dikelola dan diselesaikan secara komprehensif, menyeluruh mulai dari mengurangi sumber sampah (pencemaran) dan penanganannya diwilayah pesisir, melibatkan seluruh stakeholder terkait.
11. Kondisi stagnan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung karena keterbatasan anggaran dan belum jelasnya status peralihan P3D aset-aset pelabuhan yang sebelumnya dibangun dan dikelola oleh kabupaten/kota.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2024), yaitu :***"Rakyat Lampung Berjaya"***; dengan

6 misi pembangunannya yaitu:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Selain itu dalam Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu **Program Nelayan Berjaya**, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan:

a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia.
d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi.
e. SPBU untuk Nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan I kan (TPI) dan sentra pertambakan.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan UPTD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan secara khusus akan mendukung pencapaian **Misi ke 5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan** serta **Misi ke 6 Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.**

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-5, dilakukan melalui Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan melalui program subsidi, fasilitasi pemasaran dan peningkatan mutu, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi,

penyediaan sarana dan prasarana serta Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha.

Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diprioritaskan untuk mendukung Misi ke 5 tersebut yaitu:

a. Program Pengelolaan PerikananTangkap
b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-6, dilakukan melalui Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan, dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) khususnya Tujuan ke 14, Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan alokasi ruang laut yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup serta didukung pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Untuk melaksanakan Misi ke 6 tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program :

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
b. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan telaah terhadap Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) Tahun 2020 – 2024, mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka terdapat 5 Arah Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan yakni:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan

2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan tersebut dalam rangka mewujudkan Visi Presiden 2020 – 2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Secara khusus, arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru yaitu 1) Memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan 2) Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat lagi.

Untuk mewujudkan keselarasan kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh oleh KKP dan sasaran strategis Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024, terdapat 3 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project)* yang terintegrasi dan melibatkan K/L; Pusat, Daerah, BUMN dan Masyarakat yaitu:

1. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng; meningkatkan produksi perikanan budidaya ikan nasional menjadi 10,32 juta ton dan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun.
2. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional; meningkatkan produksi perikanan tangkap menjadi 10,10 juta ton, dan nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8 miliar pada 2024
3. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan; meningkatkan pendapatan petani dan nelayan rata-rata 5% dan 10% per tahun (target SDGs), serta produktivitas komoditas 5% per tahun.

Selain itu KKP juga mendukung Major Project Pengembanan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas/Unggulan (Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger -Semeru, Bangka-Belitung, dan Morotai).

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI LAMPUNG

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis karena berada di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi pintu gerbang baik dari arah Pulau Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimum bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, sebagaimana sudah diubah dalam Perda Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan substansi revisi tersebut maka Pola ruang Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Bebarapa kawasan andalan telah ditetapkan dalam PP No 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dan Perda No 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung, yaitu Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, dan Liwa-Krui;
2. Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut:
    a. Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Way Kanan.
    b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
    c. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih

dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.

d. Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di, Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro).

e. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.

f. Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.

3. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut:

   a. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
   b. Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
   c. Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
   d. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.

e. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
f. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.
g. Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.

4. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian.

3.5. TELAAHAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, Luas Perairan Laut (12 mil) seluas 24.820,0 Km^2 dengan luas wilayah pesisir 440.010 Ha dan total luas daerah tangkapan perairan air tawar seluas 17.807 Km^2. Provinsi Lampung memiliki panjang garis pantai sepanjang 1.105 Km dan 132 pulau-pulau kecil. Selain itu Provinsi Lampung memiliki dua teluk besar yaitu Teluk Semangka dan Teluk Lampung. Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi meliputi satu Kota dan enam Kabupaten yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tulang Bawang. Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

1. **Kawasan Pemanfaatan Umum**
   a. Zona Pariwisata (KPU-W)
   b. Zona Permukiman (KPU-PM)
   c. Zona Pelabuhan (KPU-PL)
   d. Zona Pertambangan (KPU-TB)
   e. Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT)
   f. Zona Perikanan Budidaya (KPU-BD)
   g. Zona Industri (KPU-ID)

Gambar 3.1. Peta Kawasan Pemanfaatan Umum

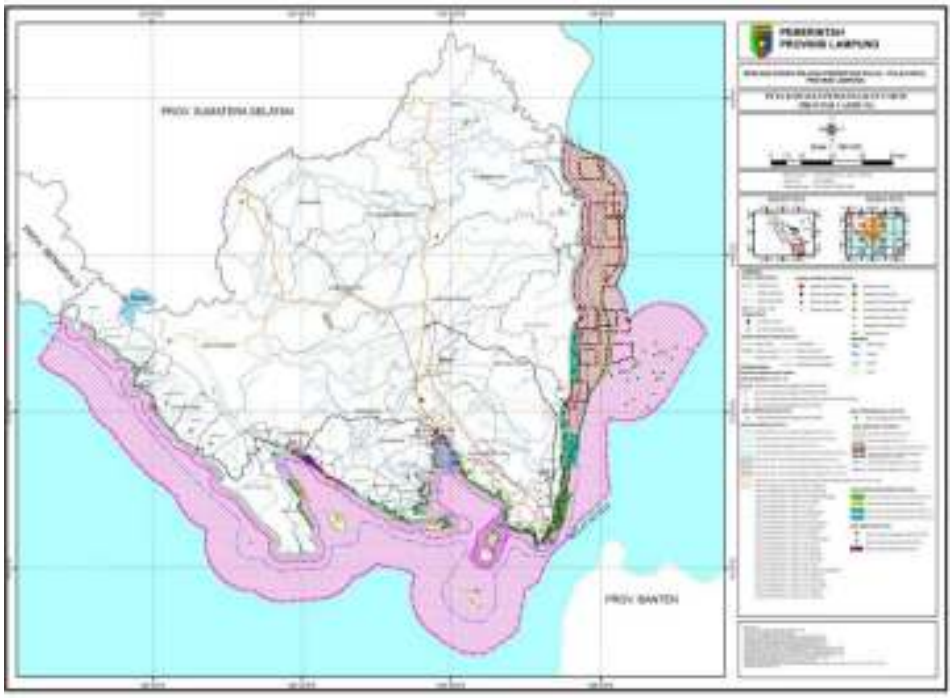

Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

2. **Kawasan Konservasi**

   a. Kawasan Konservasi Perairan; dan

   b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Gambar 3.2. Peta Kawasan Pemanfaatan Umum

Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

a. KSN Tertentu berupa pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Betuah di Kabupaten Pesisir Barat;
b. Daerah latihan militer Teluk Lampung di Kabupaten Pesawaran (KSN-TL-1); dan
c. Kawasan Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan (KSN-KSS-2).

Gambar 3.3. Peta Kawasan Strategis Nasional Tertentu

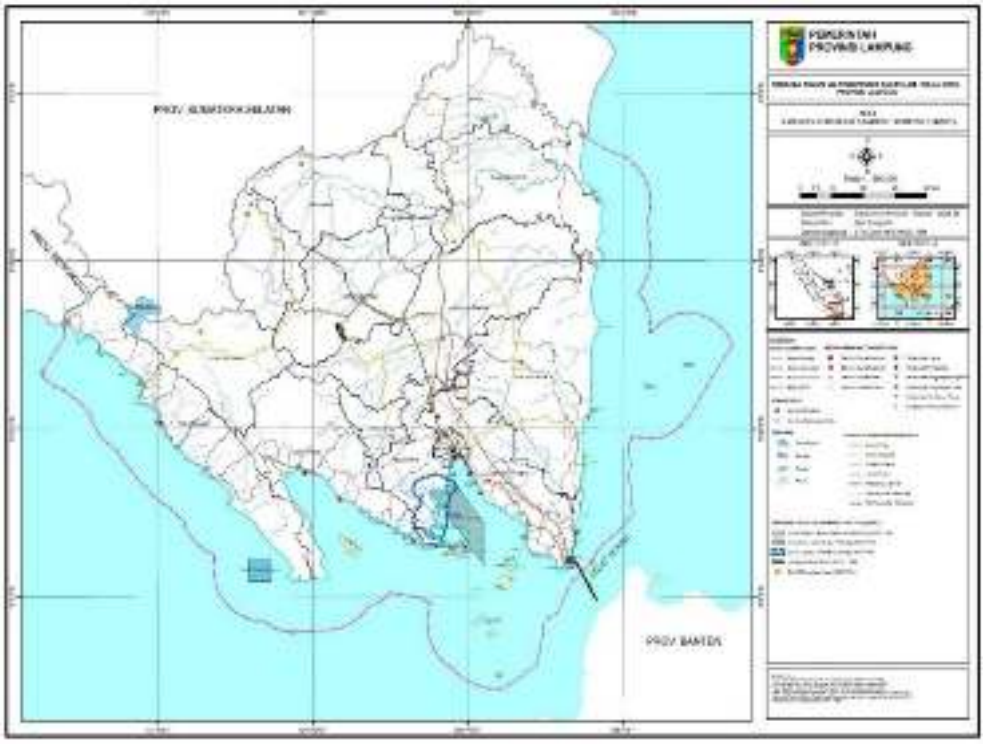

Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

4. Alur Laut

a. Alur Pelayaran: alur pelayaran internasional, alur pelayaran nasional, alur pelayaran regional, alur pelayaran local, alur pelayaran khusus, dan alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
b. Pipa/Kabel Bawah Laut: alur kabel Optik PT Telkom, alur Jaringan Pipa Gas, dan alur PLN/Transmisi Listrik 500 kV serta rencana alur kabel PLN; dan
c. Migrasi Biota Laut : Alur Migrasi Mamalia Laut dan Alur Migrasi Penyu.

Gambar 3.4. Peta Alur Laut

Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Lampung

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi-misi, renstra OPD yang lalu, RTRW dan RZWP3K, maka dapat dihimpun isu strategis kelautan perikanan tersebut menjadi komponen SWOT yang secara sistematis dikelompokkan dalam komponen kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut :

Kekuatan (*STRENGTH*)	**Kelemahan (*WEAKNESS*)**
• Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dan posisi geografis yang strategis • Dukungan regulasi kelautan dan perikanan yang ada, al: Perda RZWP3K, Perda Perlindungan Nelayan. • Masuk dalam prioritas 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024. • Dukungan anggaran yang sudah ada (APBN dan APBD) • Keberadaan 3 UPT Pusat untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung • Terbentuknya kelembagaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) • Program Kartu Petani Berjaya sebagai ekosistem Pelaku Utama sektor Pertanian secara umum.	• Terbatasnya sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah • Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha • Lemahnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar • Lemahnya aplikasi teknologi budidaya terkini, efisiensi pakan dan penerapan standar CBIB. • Rendahnya mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap. • Pengurusan dokumen perikanan kapal masih tergantung pada intitusi lain (KSOP) • Lemahnya pemanfaatan bioteknologi / potensi kelautan non konsumsi
Peluang (*OPORTUNITY*)	**Ancaman (*THREAT*)**
• Berkembangnya sistem teknologi informasi dan industri 4.0, termasuk teknologi perikanan. • Akses pasar bebas masyarakat ekonomi Asean • Berkembangnya permintaan produk non konsumsi dan ekspor ikan hias • Pengembangan kawasan konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir • Perubahan / Dinamika regulasi di level pusat. • Pengembangan budidaya lobster dan komoditas ekonomis bernilai tinggi lainnya.	• Pandemi Covid 19 masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan dan berdampak dalam kehidupan masyarakat. • Penurunan permintaan hasil produksi perikanan terutama disebabkan penurunan daya beli masyarakat, dan pembatasan kegiatan. • Perlambatan ekonomi global, penurunan permintaan ekspor. • Serangan penyakit dan penurunan daya dukung lingkungan. • Perubahan Iklim • IUU Fishing • Pencemaran dan sampah pesisir • Adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Mengacu kepada Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024 dan analisis isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

Tabel 4.1. Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Srategis dan Indikator Sasaran

No.	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1.	Rakyat Lampung Berjaya	(5) Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya	Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	Pencapaian (Prosentase) Produksi Perikanan
			Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian.	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan
		(6) Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	Meningkatkan Indeks Kualitas air Laut	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Pencapaian Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.25)

Visi : **"Rakyat Lampung Berjaya"**

Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator sasaran	Baseline Data (2018)	Target Capaian Indikator Sasaran					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan									
Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	303.423 (ton)	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	18.054 (ton)	100	100	100	100	100	100
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama									
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase) pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	NA	NA	80	85	90	95	100

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis SWOT dari isu-isu strategis maka terdapat beberapa **strategi** yang menjadi arah kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan kurun waktu 2019-2020 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan**

   Arah Kebijakan :

   1. Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan
   2. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi
2. **Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan**

   Arah Kebijakan :

   3. Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan
   4. Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan berkeadilan
3. **Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya**

   Arah Kebijakan :

   5. Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk perikanan
   6. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut diatas, program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Renstra 2019-2020 juga memperhatikan pengarusutamaan dari:

1. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);** Imlementasi SDGs (Goal 14), meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan yang dikelola.

2. **Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (PPRB);** Penyelarasan Renja tahunan dengan Pergub No: 164 thn 2018 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung
3. **Stunting**; Prioritas daerah rawan stunting untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah dan Ibu Hamil, Meningkatkan angka kosumsi ikan masyarakat.
4. **Penanggulangan kemiskinan**; Penyelarasan lokasi dan sasaran kegiatan/ bantuan pada rumah tangga miskin yang berpotensi.
5. **Gender**; Meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP

Tabel 5.1. Analisis SWOT

INTERNAL / EKSTERNAL	*STRENGTH*	*WEAKNESS*
	• Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dan posisi geografis yang strategis • Dukungan regulasi kelautan dan perikanan yang ada, al: Perda RZWP3K, Perda Perlindungan Nelayan. • Masuk dalam prioritas 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024. • Hasil dan produk kelautan perikanan yang sudah ada • Dukungan anggaran yang sudah ada (APBN dan APBD) • Keberadaan 3 UPT Pusat untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung • Terbentuknya kelembagaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB)	• Terbatasnya sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah • Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha • Lemahnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar • Lemahnya aplikasi teknologi budidaya terkini, efisiensi pakan dan penerapan standar CBIB. • Rendahnya mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap. • Pengurusan dokumen perikanan kapal masih tergantung pada intitusi lain (KSOP) • Lemahnya pemanfaatan bioteknologi / potensi kelautan non konsumsi
OPORTUNITY • Berkembangnya sistem teknologi informasi dan industri 4.0 • Meningkatnya permintaan produk hasil perikanan • Akses pasar bebas masyarakat ekonomi Asean • Berkembangnya permintaan produk non konsumsi dan ekspor ikan hias • Pengembangan kawasan konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir • Perubahan regulasi di level pusat. • Pengembangan budidaya lobster dan komoditas ekonomis bernilai tinggi lainnya	STRATEGI S-O ✓ Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan ✓ Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan ✓ pemasaran produk perikanan ✓ Kartu Petani Berjaya. ✓ Penyediaan sarana dan prasarana perikanan	STRATEGI W-O ✓ Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan. ✓ Peningkatan akses keuangan dan kredit UMKM ✓ Pemanfaatan teknologi budidaya dan pakan mandiri. ✓ Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan ✓ Pemanfaatan aplikasi/ start up di sektor kelautan dan perikanan.
THREAT • Perkembangan budidaya dan industri pengolahan negara-negara Asean. • Dampak perang dagang US – China dan perlambatan ekonomi global. • Serangan penyakit dan penurunan daya dukung lingkungan. • Perubahan Iklim • IUU Fishing • Pencemaran dan sampah pesisir • Adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut	STRATEGI S-T ✓ Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi ✓ Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha perikanan. ✓ Pemberdayaan POKMASWAS. ✓ Penguatan koordinasi lintas sektor pengawasan.	STRATEGI W-T ✓ Penataan kawasan sentra perikanan dan kelautan ✓ Branding produk dan strategi pemasaran di era Digital

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (T-C.26)

Visi (RPJMD) :	Rakyat Lampung Berjaya			
Misi (RPJMD)	**Tujuan (Renstra)**	**Sasaran (Renstra)**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
(5) Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	1. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya	1.1. Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	1. Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan	1. Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan 2. Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan berkeadilan
	2. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	1.2. Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	1. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya	1. Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk perikanan 2. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan.
(6) Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	3. Meningkatkan Indeks Kualitas air Laut	2.1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	1. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	1. Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan 2. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui rencana kerja tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dengan capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Penyusunan program kegiatan menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi dalam pelaksanaan pembangunan termasuk disektor kelautan dan perikanan.

Dalam mewujudkan capaian kinerja pembangunan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta tugas pokok dan fungsi OPD, serta berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang sudah dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Potensi Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung sangat bervariasi, mulai dari komoditas lobster dan tuna di Pesisir Barat, berbagai ikan pelagis dan demersal di Teluk Semaka dan Teluk Lampung sampai dengan Udang dan Rajungan di Pesisir Timur. Permasalahan yang dihadapipun cukup kompleks, diantaranya masih sangat sedikit kapal perikanan yang memiliki dokumen perizinan, masih adanya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan/ *IUU fishing,* rendahnya mutu hasil tangkapan sampai dengan kondisi stagnan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung karena keterbatasan anggaran dan belum jelasnya status peralihan P3D aset-aset pelabuhan yang sebelumnya dibangun dan dikelola oleh kabupaten/kota. Provinsi Lampung memiliki 4 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang juga perlu mendapat dukungan anggaran operasional dan pengembangan sarana dan prasarana.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa kegiatan yang mendukung Pengembangan Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung meliputi:

1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil.
2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah ProvinsiPenyediaan data dan informasi sumber daya ikan.
3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
4) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.
5) Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT.

II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Potensi perikanan budidaya di Provinsi Lampung cukup lengkap, mulai dari budidaya laut (kerapu, kerang hijau, rumput laut), budidaya air tawar (lele, patin, mas, gurame, dsb) dan budidaya air payau/ tambak (udang vaname, windu dan bandeng), bahkan Lampung sempat memiliki kawasan budidaya udang terbesar di Indonesia. Sayangnya saat ini kegiatan budidaya menghadapi beberapa masalah, mulai dari trend menurunnya produksi, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang masih rendah (< 100), menurunnya daya dukung lingkungan hingga masalah penyakit. Meskipun provinsi Lampung juga masuk dalam 10 besar pensuplai benih/benur nasional, namun kondisi balai-balai benih milik pemerintah justru beroperasi tidak optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa kegiatan yang mendukung pengembangan budidaya perikanan dan perbenihan di Provinsi Lampung meliputi:

1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

III. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dengan beragamnya produksi perikanan di Provinsi Lampung, baik yang berasal dari penangkapan maupun budidaya, perlu didukung pengolahan, pemasaran dan peningkatan mutu untuk memperoleh nilai tambah dan peningkatan daya saing produk

perikanan Lampung. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan perlu berperan aktif dalam mengurangi permasalahan stunting dan pemenuhan gizi sumber protein masyarakat. Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) unit Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LPPHP) yang sudah terakreditasi KAN sebagai Lembaga Pengujian (ISO SNI 17025) dan Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan / LS Pro HP (ISO SNI 17065). Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ini melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan produk hasil perikanan, monitoring keamanan pangan serta penilaian kesesuain SNI produk olahan hasil perikanan. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pengolahan, pemasaran dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat yang meliputi

1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.
3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

IV. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan wilayah perairan 0-12 mil ke Provinsi, sesuai dengan UU 23 tahun 2014, maka pengelolaan ruang laut khususnya wilayah perairan 0-12 mil sepenuhnya menjadi kewenangan Provinsi. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi OPD untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan didalamnya. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan yang mendukung pengelolaan ruang laut sebagai berikut:

1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

V. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Selain pengelolaan wilayah perairan 0-12 mil, sesuai dengan UU 23 tahun 2014, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dilimpahkan

sepenuhnya kepada Provinsi. Hal ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab dan tantangan besar bagi provinsi mengingat keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana pengawasan yang dimiliki bila harus mengawasi seluruh wilayah yang menjadi kewenangan provinsi. Oleh karena itu, strategi pengawasan terpadu dan terintegrasi dengan stakeholder terkait menjadi prioritas, didukung dengan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas dan patroli bersama.

Rincian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Selain yang mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan secara langsung, OPD juga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (kesekretariatan), yang meliputi kegiatan:

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Secara detail Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Indikatif untuk Dinas Kelautan dan Perikanan di tahun 2019 – 2024 sebagaimana dalam Lampiran 1. Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Sebagai pedoman dalam perubahan Renstra, sudah disusun matrik Pemetaan antara Program dan Kegiatan sebelum dengan hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan berdasarkan Permendagri.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Lampung, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (T-C.28)

No	Indikator	Baseline Data (2018)	Target Capaian Indikator Sasaran (perubahan)						Kondisi Kinerja pada Akhir periode
			2019 (T0)	2020(T1)	2021 (T2)	2022 (T3)	2023 (T4)	2024 (T5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	303.423	(100) 343.602	(100) 380.149	(100) 313.458	(100) 329.131	(100) 354.884	(100) 391.180	(100) 391.180
2.	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	18.054	100 (18.750)	100 (19.859)	100 (18.361)	100 (19.279)	100 (20.725)	100 (22.797)	100 (29.076)
3.	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	NA	NA	80	85	90	95	100	100

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 (tiga) indikator yang mendukung pada pencapaian sasaran RPJMD yaitu (1) Jumlah Produksi Perikanan dan (2) Jumlah Ekspor Perikanan yang mendukung Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian serta (3) Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang untuk mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung. Indikator tersebut selanjutnya dijabarkan dalam indikator Program dan Kegiatan yang secara rinci dapat dilihat dalam Lampiran 1. Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja pembangunan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung sesuai bidang urusan yang mengacu pada indikator kinerja daerah provinsi lampung sebagaimana dijelaskan dalam **Tabel. 7.2** berikut ini:

Tabel 7.2. Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung

No.	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan
1.	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	Dihitung berdasarkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam 1 tahun **dibagi** dengan Target Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dikali 100 persen.
2.	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	Dihitung berdasarkan Jumlah/Volume Ekspor Produk Perikanan dalam 1 tahun **dibagi** dengan Target Jumlah/Volume Ekspor Produk Perikanan dikali 100 persen.
3.	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	Dihitung berdasarkan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut dan/atau mengajukan perizinan yang sesuai dengan alokasi pemanfaatan ruang laut berdasarkan Perda RZWP3K **dibagi** dengan Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut yang ada dan/atau mengajukan perizinan pemanfaatan ruang laut dikali 100 persen.

BAB 8 PENUTUP

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan harus dimulai dari tahapan perencanaan yang baik dan cermat. Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya menjadi pedoman, arah kebijakan dan sekaligus alat ukur dalam evaluasi dan monitoring terhadap capaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Namun demikian, renstra bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Apabila dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perkembangan dan perubahan, baik dari faktor eksternal maupun internal, maka komponen dalam renstra mulai dari misi, program dan kegiatan maupun target indikator kinerja dapat diubah untuk menyesuai dengan perubahan situasi dan kondisi terkini yang harus dihadapi. Masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat dalam penyusunan dimasa-masa yang akan datang.

Demikianlah dokumen Renstra Perubahan ini disusun, tanpa dukungan anggaran yang memadai dan kerjasama seluruh pihak terkait, maka target yang ingin dicapai pada akhir periode akan sulit terwujud. Semoga dokumen ini bermanfaat, menuju pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Lampung lebih baik dari tahun ke tahun. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini.

Bandar Lampung, Januari 2022
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ir. LIZA DERNI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 199903 2 003

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

NAMA OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA			PERMENDAGRI NO. 90/2019							
NO. REKENING (sesuai database aplikasi)	**URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN (sesuai database aplikasi)**	**INDIKATOR**	**SUB KEGIATAN (sesuai Permendagri)**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**	**KEGIATAN (sesuai Permendagri)**	**PROGRAM (sesuai Permendagri)**	**INDIKATOR PROGRAM**	**BIDANG URUSAN**	**URUSAN**	**KODE**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
03	URUSAN PEMERINTAHAN : PILIHAN									
031	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN							URUSAN PEMERINTAHAN : PILIHAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3 1 1	**Dinas Kelautan dan Perikanan**									
3.1.1.1	**Dinas Kelautan dan Perikanan**									
3.1.1.1.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran**				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN : PILIHAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN	'3.25.01.2.03
3.1.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.02
3.1.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.07
3.1.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan/ peralatan kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan/ peralatan kebersihan kantor	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.08
3.1.1.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Layanan perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Layanan perbaikan peralatan kerja	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.09
3.1.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.10
3.1.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.11
3.1.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.13
3.1.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.12
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.14
3.1.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.15
3.1.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.17
3.1.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.18
3.1.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	-							
3.1.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTHL (orang)	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.07
3.1.1.1.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Peningkatan Sapras Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (1 Dinas, 4 UPTD)**			Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	URUSAN PEMERINTAHAN : PILIHAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN	'3.25.01.2.03
3.1.1.1.2.1	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.20
3.1.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.22
3.1.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor (unit)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor (unit)	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.28

3.1.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.06
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.30
3.1.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.32
3.1.1.1.3	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (orang)**			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (orang)	URUSAN PEMERINTAHAN : PILIHAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01.2.04
3.1.1.1.3.1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi (orang)	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi (orang)	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.04.09
3.1.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Jumlah pembinaan budaya kerja (kali)	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan (kali)	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.04.10
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.04.11
3.1.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Ketersediaan pelayanan informasi publik (pelayanan)	-							
3.1.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel)	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel)	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.04.02
3.1.1.1.4	**Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (dokumen)**								3.25.01.2.01.
3.1.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja (Laporan Kinerja, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, PK, dan LPPD/LKPJ)	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja (Laporan Kinerja, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, PK, dan LPPD/LKPJ)	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (orang)			3.25.01.2.01.03
3.1.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.02.04
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.02.06
3.1.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Rencana aksi, Rencana Kinerja tahunan, Identifikasi resiko program/ kegiatan (SPIP)	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Rencana aksi, Rencana Kinerja tahunan, Identifikasi resiko program/ kegiatan (SPIP)	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.01.01
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.01.04
3.1.1.1.4.4	Penyusunan Data dan Informasi melalui Website, Media Sosial dan Pameran Pembangunan	Implementasi Aplikasi e-Government Pameran								
3.1.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.02.03
3.1.1.1.17	**Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan**	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN : PILIHAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02.
3.1.1.1.17.1	Pemantauan dan pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan				3.25.05.1.02.03
			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	Pengawasan Sumberdaya Prikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan				3.25.05.1.02.01

			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	Pengawasan Sumberdaya Prikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan				3.25.05.1.02.02
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 MIL	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan				3.25.05.1.01.03
3.1.1.1.17.2	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Jumlah pokmaswas yang dibina (pokmaswas)	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang dibina (pokmaswas)	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan				3.25.05.1.01.04
3.1.1.1.17.3	Penanganan pelanggaran pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan (%)	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan (%)	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan				3.25.05.1.01.01
3.1.1.1.17.4	Penyediaan operasional patroli laut dan pemeliharaan kapal pengawasan	Tersedianya Operasional Kapal Pengawasan mendukung patroli laut (unit)	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Tersedianya Operasional Kapal Pengawasan mendukung patroli laut (unit)	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan				3.25.05.1.01.02
3.1.1.1.17.5	Bantuan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang terlibat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (kab/kota)	-							
3.1.1.1.17.6	Penyediaan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sarana prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang disediakan (paket)	-							
3.1.1.1.20	**Program pengembangan budidaya perikanan**	**Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			3.25.04.1.01.
3.1.1.1.20.1	Pembinaan, fasilitasi usaha kelompok pembudidaya ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina (kelompok)	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina (kelompok)	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				3.25.04.1.01.02
3.1.1.1.20.2	Peningkatan kompetensi SDM kelompok pembudidaya ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya (pembudidaya)	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya (pembudidaya)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				3.25.04.1.05.07
3.1.1.1.20.3	Pengembangan kawasan budidaya berkelanjutan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan (paket)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan (paket)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				3.25.04.1.05.02
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				3.25.04.1.05.01
			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				3.25.04.1.05.03
3.1.1.1.20.4	Monitoring pakan, obat ikan, residu dan penyakit serta pendampingan audit	Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan (kegiatan)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan (kegiatan)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				3.25.04.1.05.06
3.1.1.1.20.5	Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan (paket)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan (paket)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				3.25.04.1.05.05
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				3.25.04.1.05.04
3.1.1.1.20.6	Operasional Kegiatan di UPTD Balai Budidaya	Jumlah UPTD Balai Benih Ikan yang dibiayai operasionalnya (UPTD)	-							
3.1.1.1.21	**Program pengembangan perikanan tangkap**	**Produksi Perikanan Tangkap (ton)**				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)			3.25.03.1.01.
3.1.1.1.21.1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Jumlah PUD yang dikelola dan lokasi inventarisasi potensi sumberdaya ikan (Kab/Kota)	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah PUD yang dikelola dan lokasi inventarisasi potensi sumberdaya ikan (Kab/Kota)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				3.25.03.1.01.01
3.1.1.1.21.2	Penyediaan data dan informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data SDI yang tersedia (dokumen).	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data SDI yang tersedia (dokumen).	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				3.25.03.1.02.01

3.1.1.1.21.3	Penyediaan sarana dan prasarana nelayan	Jumlah sarana dan prasarana nelayan yang memenuhi standar (paket)	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana nelayan yang memenuhi standar (paket)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				3.25.03.1.02.02
3.1.1.1.21.4	Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan	Jumlah kapal perikanan yang didaftarkan dan memiliki tanda kapal (unit)	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kapal perikanan yang didaftarkan dan memiliki tanda kapal (unit)	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				3.25.03.1.09.02
3.1.1.1.21.5	Pembinaan dan monitoring program kenelayanan	Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilaksanakan(kegiatan)	**KAB/KOTA**							
3.1.1.1.21.6	Peningkatan kapasitas untuk nelayan berjaya	Jumlah nelayan/ kelompok yang meningkat kompetensinya/ mendapat asuransi (orang)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					3.25.03.1.01.03
3.1.1.1.21.7	Pembinaan dan Penataan Pelayanan Perizinan Kewenangan Daerah	Jumlah nelayan yang dibina/dilayani dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap (lokasi)	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah nelayan yang dibina/dilayani dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap (lokasi)	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				3.25.03.1.03.01
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT							3.25.03.1.03.02
3.1.1.1.21.8	Penataan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Lampung	Jumlah Pelabuhan yang ditata/ dibangun sarananya (pelabuhan)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan yang ditata/ dibangun sarananya (pelabuhan)	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				3.25.03.1.06.02
3.1.1.1.21.9	Peningkatan pelayanan kesyahbandaran dan SHTI di pelabuhan perikanan	Jumlah lokasi Pelayanan Kesyahbandaran dan Penerbitan SHTI di Pelabuhan Perikanan (pelabuhan)	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan dan TPI yang dibina (Pelabuhan)	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				3.25.03.1.06.01
3.1.1.1.21.10	Pembinaan dan pendampingan CPIB di Pelabuhan dan TPI Hygienis	Jumlah Pelabuhan dan TPI yang dibina (Pelabuhan)			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				3.25.03.1.06.01
3.1.1.1.21.11	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I yang dikelola (UPTD)	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I yang dikelola (UPTD)	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				3.25.03.1.06.03
3.1.1.1.21.12	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II yang dikelola (UPTD)	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II yang dikelola (UPTD)	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				3.25.03.1.06.03
3.1.1.1.21.13	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III yang dikelola (UPTD)	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III yang dikelola (UPTD)	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				3.25.03.1.06.03
3.1.1.1.21.14	Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan	Jumlah lokasi program Komite pengelolaan perikanan ranjungan berkelanjutan (KPPRB) yang dikelola (Kab/Kota)	-							
3.1.1.1.25	**Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan**	**Volume Ekspor Perikanan (kg)**				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Volume Ekspor Perikanan (kg)**			3.25.06.1.02.
3.1.1.1.25.1	Peningkatan Konsumsi melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah sasaran/peserta yang menerima pemberian makanan tambahan berbahan ikan (orang)	-							
3.1.1.1.25.2	Pembinaan dan Peningkatan kompetensi kelompok pengolah dan pemasar	Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi/ meningkat kompetensinya (orang)	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi/ meningkat kompetensinya (orang)	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				3.25.06.1.02.01
			Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				3.25.06.1.01.01
3.1.1.1.25.3	Pengembangan sentra pengolahan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengolah dan pemasar	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan (paket)	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan (paket)	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				3.25.06.1.03.02
3.1.1.1.25.4	Pengelolaan data potensi dan investasi, promosi serta kemitraan	Jumlah dokumen potensi investasi/ promosi yang disusun (dokumen)	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen potensi investasi/ promosi yang disusun (dokumen)	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				3.25.06.1.01.03

			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				3.25.06.1.03.03
3.1.1.1.26	**Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan**	**Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang sesuai standar**				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Volume Ekspor Perikanan (kg)**			3.25.06.1.02.
3.1.1.1.26.1	Pengembangan produk dan standarisasi hasil perikanan	Jumlah produk, UMKM, UPI dan unit budidaya yang sesuai standar	-							
3.1.1.1.26.2	Monitoring Keamanan Pangan dan Pelaksanaan Pengujian Hasil Perikanan Hulu Sampai Hilir	Jumlah produk, TPI, pasar, kualitas air, pakan ikan, residu antibiotik yang terpantau	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah produk, TPI, pasar, kualitas air, pakan ikan, residu antibiotik yang terpantau	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				3.25.06.1.02.02
			Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				3.25.06.1.03.01
3.1.1.1.26.3	Operasional UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah UPTD yang disediakan operasionalnya	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah UPTD yang disediakan operasionalnya	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.25.01.2.03.16
3.1.1.1.26.4	Peningkatan Kualitas Layanan di UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Laboratorium pengujian terakreditasi yang disediakan operasionalnya	-							
3.1.1.1.27	**Program Pengelolaan Ruang Laut**	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)				Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)			3.25.02.1.01.
3.1.1.1.27.1	Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Laut	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan aturan pelaksananya yang diterbitkan (dokumen)	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan aturan pelaksananya yang diterbitkan (dokumen)	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil				3.25.02.1.01.01
3.1.1.1.27.2	Pendayagunaan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Jasa Kelautan	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik (lokasi)	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik (lokasi)	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil				3.25.02.1.03.01
			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil					3.25.02.1.03.02
			Penerbitan rekomendasi izin pelaksanaan reklamasi di Perairan Pesisir		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					3.25.02.1.02.04
3.1.1.1.27.3	Operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan konservasi yang dikelola (2 lokasi)	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kawasan konservasi yang dikelola (2 lokasi)	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil				3.25.02.1.01.03
3.1.1.1.27.4	Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah pemanfaatan/perizinan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai peraturan (dokumen)	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah pemanfaatan/perizinan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai peraturan (dokumen)	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil				3.25.02.1.02.01
			Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					3.25.02.1.02.02
			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					3.25.02.1.02.03
3.1.1.1.27.5	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan Perairan dan Keanekaragaman Hayati	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil				3.25.02.1.01.02

MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
									TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
									TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				PROGRAM																		
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	**3.25.03**	**I.**	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**		**1). Produksi Perikanan Tangkap (ton)**	**142,840**	**188,790.09**	**10,039,800**	**151,869.90**	**8,964,789**	**159,463.40**	**8,999,288**	**167,441.57**	**7,150,000**	**184,185.72**	**7,150,000**	**184,185.72**	**42,303,877**	Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi Lampung
							2). Nilai Tukar Nelatan (NTN)	117,10	117,69		**103.47**		**103.99**		**104.51**		**105.03**		**105.03**			
				KEGIATAN																		
			3.25.03.1.01	**I.**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**		**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**		**3 kegiatan**	**800,000**	**3 kegiatan**	**1,100,000**	**3 kegiatan**	**1,450,000**	**3 kegiatan**	**1,200,000**	**3 kegiatan**	**1,200,000**	**3 kegiatan**	**5,750,000**		**Provinsi Lampung**
			3.25.03.1.01.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah		1 dokumen	300,000	1 dokumen	300,000	1 dokumen	300,000	1 dokumen	200,000	1 dokumen	200,000	1 dokumen	1,300,000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.01.02	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah		100 unit	300,000	100 unit	500,000	100 unit	750,000	100 unit	600,000	100 unit	600,000	100 unit	2,750,000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.01.03	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah		1000 unit	200,000	1000 unit	300,000	1200 unit	400,000	1500 unit	400,000	1500 unit	400,000	1500 unit	1,700,000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.02	**II**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**		**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya**		**3 kegiatan**	**800,000**	**3 kegiatan**	**1,250,000**	**3 kegiatan**	**1,250,000**	**3 kegiatan**	**650,000**	**3 kegiatan**	**650,000**	**3 kegiatan**	**4,600,000**		**Provinsi Lampung**
			3.25.03.1.02.01	4	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat		1 dokumen	300,000	1 dokumen	450,000	1 dokumen	450,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	1,400,000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.02.02	5	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah		100 unit	300,000	100 unit	500,000	100 unit	500,000	100 unit	350,000	100 unit	350,000	100 unit	2,000,000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.02.03	6	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah		100 unit	200,000	100 unit	300,000	100 unit	300,000	100 unit	200,000	100 unit	200,000	100 unit	1,200,000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.03	**III**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT**		**Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap yang diterbitkan**		**200 Nelayan**	**175,000**	**400 Nelayan**	**175,000**	**500 Nelayan**	**175,000**	**500 Nelayan**	**100,000**	**500 Nelayan**	**100,000**	**500 Nelayan**	**500,000**		**Provinsi Lampung**
			3.25.03.1.03.01	7	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap unuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT samapi		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	75,000	1 dokumen	75,000	1 dokumen	75,000	-	-	-	-	1 dokumen	225,000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.03.02	8	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	300 Nelayan	200 rekomendasi	100,000	250 rekomendasi	100,000	300 rekomendasi	100,000	300 rekomendasi	100,000	350 rekomendasi	100,000	350 rekomendasi	500,000	Bid. PT	Provinsi Lampung
			3.25.03.1.06	**IV**	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**		**Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola**		**4 Pelabuhan**	**8,189,800**	**4 Pelabuhan**	**6,364,789**	**4 Pelabuhan**	**6,049,288**	**4 Pelabuhan**	**5,100,000**	**4 Pelabuhan**	**5,100,000**	**4 Pelabuhan**	**30,803,877**		**Provinsi Lampung**
			3.25.03.1.06.01	9	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	20 Lokasi	2 Pelabuhan Perikanan	100,000	3 Pelabuhan Perikanan	100,000	3 Pelabuhan Perikanan	100,000	3 Pelabuhan Perikanan	100,000	3 Pelabuhan Perikanan	100,000	3 Pelabuhan Perikanan	500,000	Bid. PT	Kab/Kota Pesisir
			3.25.03.1.06.02	*10*	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan*		*Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang*	2 Pelabuhan	5 unit	4,193,000	5 unit	3,964,789	8 unit	3,849,288	8 unit	3,500,000	10 unit	3,500,000	10 unit	19,007,077	Bid. PT	Kab/Kota Pesisir
			3.25.03.1.06.03	11	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana di PPP Lempasing	1 PPP	1 layanan	1,000,000	1 layanan	700,000	1 layanan	700,000	1 layanan	500,000	1 layanan	500,000	1 layanan	3,400,000	UPTD PP	Lempasing
							Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana di PPP Labuhan	2 PPP	2 layanan	946,800	2 layanan	900,000	2 layanan	700,000	2 layanan	500,000	2 layanan	500,000	2 layanan	3,546,800	UPTD PP	Labuhan Maringgai & Teladas
							Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana di PPP Kota Agung	1 PPP	1 layanan	1,950,000	1 layanan	700,000	1 layanan	700,000	1 layanan	500,000	1 layanan	500,000	1 layanan	4,350,000	UPTD PP	Kota Agung
			3.25.03.1.09	**V**	**Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**		**Jumlah Kegiatan mendukung Pendaftaran Kapal Perikanan di**		**1 kegiatan**	**75,000**	**1 kegiatan**	**75,000**	**1 kegiatan**	**75,000**	**1 kegiatan**	**100,000**	**1 kegiatan**	**100,000**	**1 kegiatan**	**425,000**		**Provinsi Lampung**
			3.25.03.1.09.02	12	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan		100 Rekomendasi	75,000	100 Rekomendasi	75,000	100 Rekomendasi	75,000	100 Rekomendasi	100,000	100 Rekomendasi	100,000	100 Rekomendasi	425,000	Bid. PT	Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
								TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				PROGRAM																	
			3.25.04	**II.**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**1). Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**160,582.92**	**191,358.54**	**4,175,000**	**161,588.70**	**4,925,000**	**169,668.14**	**4,725,000**	**187,442.89**	**5,225,000**	**206,995.13**	**7,075,000**	**206,995.13**	**26,125,000**		
						2). Jumlah benih (juta ekor)	**12,209.47**	**13,634.44**		**14,485.19**		**15,404.01**		**16,396.33**		**17,468.03**		**17,468.03**			
						3). Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	**95.84**	**97.28**		**98.74**		**100.22**		**101.72**		**103.25**		**103.25**			
				KEGIATAN																	
			3.25.04.1.01	**I**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan (dokumen)**		**1 0 dokumen**	**275,000**	**1 0 dokumen**	**275,000**	**1 0 dokumen**	**275,000**	**1 0 dokumen**	**275,000**	**1 5 dokumen**	**275,000**	**55 dokumen**	**1,375,000**		**Provinsi Lampung**
			3.25.04.1.01.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidyaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		1 rekomendasi	100,000	1 rekomendasi	100,000	3 rekomendasi	100,000	3 rekomendasi	75,000	3 rekomendasi	75,000	3 rekomendasi	450,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.01.02	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan		3 rekomendasi	75,000	5 rekomendasi	75,000	5 rekomendasi	75,000	5 rekomendasi	100,000	5 rekomendasi	100,000	5 rekomendasi	425,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.01.03	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan		1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	500,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.05	**II.**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**		**7 kegiatan**	**3,900,000**	**7 kegiatan**	**4,650,000**	**7 kegiatan**	**4,450,000**	**7 kegiatan**	**4,950,000**	**7 kegiatan**	**6,800,000**	**7 kegiatan**	**24,750,000**		**Provinsi Lampung**
			3.25.04.1.05.01	4	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	500,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.05.02	5	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5	20 unit	1,000,000	20 unit	1,000,000	20 unit	1,000,000	20 unit	1,000,000	20 unit	1,000,000	20 unit	5,000,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.05.03	*6*	*Penyediaan **Prasarana** Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan (paket)*	200	30 paket	1,500,000	30 paket	2,000,000	30 paket	1,500,000	30 paket	1,500,000	30 paket	1,000,000	120 paket	7,500,000	UPTD BBI	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.05.04	7	*Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut*	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut*	1	1 unit	300,000	2 unit	500,000	2 unit	500,000	2 unit	1,000,000	2 unit	1,600,000	2 unit	3,900,000	UPTD BBI	Tanggamus, Lampung Timur
			3.25.04.1.05.05	*8*	*Penyediaan **Sarana** Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan (unit)*	15	15 unit	750,000	15 unit	750,000	15 unit	1,000,000	15 unit	1,000,000	15 unit	2,750,000	75 unit	6,250,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.05.06	9	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	15	15 dokumen	100,000	15	150,000	15 dokumen	150,000	15 dokumen	150,000	15 dokumen	150,000	75 dokumen	700,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.04.1.05.07	10	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya (pembudidaya)	1	25 orang	150,000	25 orang	150,000	25 orang	200,000	25 orang	200,000	25 orang	200,000	25 orang	900,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
								TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				PROGRAM																	
	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	**Prosentase Pencapaian ekspor perikanan**	**3.25.06**	**III.**	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**1). Volume Ekspor Perikanan (kg)**	**18,054,332**	**19,859,765**	**2,030,000**	**18,361,350**	**2,550,000**	**19,279,418**	**2,325,000**	**20,725,374**	**2,900,000**	**22,797,911**	**3,000,000**	**22,797,911**	**12,805,000**	**Bid. PBP3**	**Provinsi Lampung**
						2). Konsumsi Ikan penduduk (Kg/Kap/Thn)	**32.20**	**34.54**		**36.09**		**37.72**		**39.41**		**41.19**		**41.19**			
				KEGIATAN																	
			3.25.06.1.01	**I**	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Rekomendasi/ Sertifikasi/ Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**		**15**	**350,000**	**20**	**350,000**	**25**	**450,000**	**25**	**450,000**	**25**	**500,000**	**25**	**2,100,000**		**Provinsi Lampung**
			3.25.06.1.01.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses		1 rekomendasi	100,000	1 rekomendasi	100,000	1 rekomendasi	100,000	1 rekomendasi	100,000	1 rekomendasi	100,000	5 rekomendasi	500,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.06.1.01.02	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu)		5 rekomendasi	150,000	5 rekomendasi	150,000	5 rekomendasi	200,000	5 rekomendasi	200,000	5 rekomendasi	200,000	25 rekomendasi	900,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.06.1.01.03	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala		1 dokumen	100,000	1 dokumen	100,000	1 dokumen	150,000	1 dokumen	150,000	1 dokumen	200,000	1 dokumen	700,000	APHP	Provinsi Lampung
			3.25.06.1.02	**II**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan**		**2 kegiatan**	**740,000**	**2 kegiatan**	**1,000,000**	**2 kegiatan**	**625,000**	**2 kegiatan**	**1,000,000**	**2 kegiatan**	**1,000,000**	**2 kegiatan**	**4,365,000**		**Provinsi Lampung**
			3.25.06.1.02.01	4	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan		30 unit usaha	300,000	30 unit usaha	450,000	30 unit usaha	75,000	30 unit usaha	450,000	30 unit usaha	450,000	30 unit usaha	1,725,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.06.1.02.02	5	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan,		15 unit usaha	440,000	15 unit usaha	550,000	15 unit usaha	550,000	15 unit usaha	550,000	15 unit usaha	550,000	75 unit usaha	2,640,000	UPTD LPHP	Provinsi Lampung
			3.25.06.1.03	**III.**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota**		**3 kegiatan**	**940,000**	**3 kegiatan**	**1,200,000**	**3 kegiatan**	**1,250,000**	**3 kegiatan**	**1,450,000**	**3 kegiatan**	**1,500,000**	**3 kegiatan**	**6,340,000**		**Provinsi Lampung**
			3.25.06.1.03.01	6	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 dokumen	300,000	1 dokumen	450,000	1 dokumen	250,000	1 dokumen	450,000	1 dokumen	450,000	1 dokumen	1,900,000	UPTD LPHP	Provinsi Lampung
			3.25.06.1.03.02	7	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	1,500	10 unit usaha	440,000	10 unit usaha	550,000	10 unit usaha	750,000	10 unit usaha	750,000	10 unit usaha	750,000	50 unit usaha	3,240,000	Bid. PBP3	Provinsi Lampung
			3.25.06.1.03.03	8	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai		1 dokumen	200,000	1 dokumen	200,000	1 dokumen	250,000	1 dokumen	250,000	1 dokumen	300,000	1 dokumen	1,200,000	APHP	Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
								TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				PROGRAM																	
Meningkatkan Indeks Kualitas air Laut	**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K**	**Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan**	**3.25.02**	**IV**	**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**	**1). Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi**	**NA**	**80**	**1,825,000**	**85**	**1,242,819**	**90**	**1,487,460**	**95**	**950,000**	**100**	**750,000**	**100**	**6,255,279**	**Bid PRL**	**Provinsi Lampung**
						2). Luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau kecil (ha)	**106,000**	**192,240**		**231,467**		**270,693**		**309,920**		**349,147**		**349,147**			
				KEGIATAN																	
			3.25.02.1.01	**I**	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**		**4 kegiatan**	**1,325,000**	**4 kegiatan**	**844,118**	**4 kegiatan**	**891,460**	**4 kegiatan**	**600,000**	**4 kegiatan**	**400,000**	**4 kegiatan**	**4,060,578**		Provinsi Lampung
			3.25.02.1.01.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-	1 dokumen	2 dokumen	375,000	2 dokumen	192,694	2 dokumen	482,460	2 dokumen	300,000	2 dokumen	100,000	2 dokumen	1,450,154	Bid PRL	Provinsi Lampung
			3.25.02.1.01.02	2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	106,000	192,240	350,000	231,467	71,424	270,693	144,000	309,920	100,000	349,147	100,000	349,147	765,424	Bid PRL	Provinsi Lampung
			3.25.02.1.01.03	3	*Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*	*Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi*	-	10 ha	450,000	10 ha	580,000	10 ha	115,000	10 ha	100,000	10 ha	100,000	10 ha	1,345,000	Bid PRL	Kab/Kota Pesisir
			3.25.02.1.01.04	4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana		30 orang	150,000	30 orang	-	30 orang	150,000	60 orang	100,000	60 orang	100,000	60 orang	500,000	Bid PRL	Kab/Kota Pesisir
			3.25.02.1.02	**II**	**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (dokumen)**		10	**200,000**	10	**35,884**	10	**55,000**	15	**100,000**	15	**100,000**	60	**490,884**		Provinsi Lampung
			3.25.02.1.02.01	5	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi		2 rekomendasi	100,000	2 rekomendasi	35,884	2 rekomendasi	-	2 rekomendasi	50,000	2 rekomendasi	50,000	2 rekomendasi	235,884	Bid PRL	Provinsi Lampung
			3.25.02.1.02.02	6	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan		10 rekomendasi	100,000	10 rekomendasi	-	10 rekomendasi	55,000	10 rekomendasi	50,000	10 rekomendasi	50,000	10 rekomendasi	255,000	Bid PRL	Provinsi Lampung
			3.25.02.1.03	**III**	**Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil**		**2 kegiatan**	**300,000**	**2 kegiatan**	**362,817**	**2 kegiatan**	**541,000**	**2 kegiatan**	**250,000**	**2 kegiatan**	**250,000**	**2 kegiatan**	**1,703,817**		Provinsi Lampung
			3.25.02.1.03.01	7	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		30 orang	150,000	30 orang	220,200	30 orang	444,000	50 orang	150,000	50 orang	150,000	50 orang	1,114,200	Bid PRL	Provinsi Lampung
			3.25.02.1.03.02	8	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan		3 kelompok	150,000	3 kelompok	142,617	3 kelompok	97,000	5 kelompok	100,000	5 kelompok	100,000	5 kelompok	589,617	Bid PRL	Provinsi Lampung
				PROGRAM																	
			3.25.05	**V**	**Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan**	**1). Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan**	100	18	**1,800,000**	100	**1,900,000**	100	**2,000,000**	100	**1,900,000**	100	**1,900,000**	100	**9,500,000**	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
						2) **Jumlah Hari Operasi**		18		24		30		35		40		40			
				KEGIATAN																	
			3.25.05.1.01	**I**	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**	**Jumlah kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**		**4 kegiatan**	**1,350,000**	**4 kegiatan**	**1,300,000**	**4 kegiatan**	**1,400,000**	**4 kegiatan**	**1,300,000**	**4 kegiatan**	**1,300,000**	**4 kegiatan**	**6,650,000**		Provinsi Lampung
			3.25.05.1.01.01	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		20 dokumen	150,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	100 dokumen	950,000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
			3.25.05.1.01.02	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2 unit	20 dokumen	850,000	20 dokumen	600,000	20 dokumen	600,000	20 dokumen	600,000	20 dokumen	600,000	100 dokumen	3,250,000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
			3.25.05.1.01.03	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 MIL	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut	NA	20 dokumen	150,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	100 dokumen	950,000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
			3.25.05.1.01.04	4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	15 pokmaswas	18 pokmaswas	200,000	21 pokmaswas	300,000	24 pokmaswas	400,000	27 pokmaswas	300,000	30 pokmaswas	300,000	30 pokmaswas	1,500,000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
			3.25.05.1.02	**II**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan**		**3 kegiatan**	**450,000**	**3 kegiatan**	**600,000**	**3 kegiatan**	**600,000**	**3 kegiatan**	**600,000**	**3 kegiatan**	**600,000**	**3 kegiatan**	**2,850,000**		Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
								TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3.25.05.1.02.01	5	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan	NA	20 dokumen	150,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	100 dokumen	950,000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
			3.25.05.1.02.02	6	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	NA	20 dokumen	150,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	100 dokumen	950,000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
			3.25.05.1.02.03	6	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	NA	20 dokumen	150,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	20 dokumen	200,000	100 dokumen	950,000	Bid Pengawasan	Provinsi Lampung
					PROGRAM																
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	**Meningkatnya penilaian Laporan Akuntabilitas kinerja dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan**	**Laporan Akuntabilitas kinerja dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan min C**	**3:25:01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**19,623,030**	**100%**	**18,443,062**	**100%**	**19,645,147**	**100%**	**18,475,000**	**100%**	**18,575,000**	**100%**	**94,071,239**	Sekretariat	Provinsi Lampung
					KEGIATAN																
			3.25.01.1.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan**		**100%**	**300,000**	**100%**	**247,081**	**100%**	**150,000**	**100%**	**150,000**	**100%**	**150,000**	**100%**	**997,081**		Provinsi Lampung
			3.25.01.1.01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen	100,000	6 dokumen	193,000	6 dokumen	65,000	6 dokumen	50,000	6 dokumen	50,000	6 dokumen	458,000	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.01.02	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		3 dokumen	100,000	3 dokumen	-	3 dokumen	60,000	3 dokumen	50,000	3 dokumen	50,000	3 dokumen	260,000	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.01.07	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 laporan	100,000	6 laporan	54,081	6 laporan	25,000	6 laporan	50,000	6 laporan	50,000	6 laporan	279,081	Sekretariat	Provinsi Lampung
					KEGIATAN																
			3.25.01.1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**15,058,030**	**100%**	**14,275,870**	**100%**	**14,441,547**	**100%**	**14,545,000**	**100%**	**14,545,000**	**100%**	**72,865,447**		Provinsi Lampung
			3.25.01.1.02.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		132 Orang/ Bulan	14,858,030	122 Orang/ Bulan	14,228,870	122 Orang/ Bulan	14,396,547	125 Orang/ Bulan	14,500,000	130 Orang/ Bulan	14,500,000	130 Orang/ Bulan	72,483,447	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.02.03	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dokumen	100,000	1 dokumen	20,000	1 dokumen	25,000	1 dokumen	25,000	1 dokumen	25,000	1 dokumen	195,000	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.02.04	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		17 dokumen	100,000	17 dokumen	27,000	17 dokumen	20,000	17 dokumen	20,000	17 dokumen	20,000	17 dokumen	187,000	Sekretariat	Provinsi Lampung
					KEGIATAN																
			3.25.01.1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**100%**	**40,000**	**100%**	**20,000**	**100%**	**30,000**	**100%**	**35,000**	**100%**	**40,000**	**100%**	**75,000**		Bandar Lampung
			3.25.01.1.03.05	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	3 dokumen	20,000	3 dokumen	10,000	3 dokumen	20,000	3 dokumen	20,000	3 dokumen	20,000	3 dokumen	90,000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.03.06	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	3 dokumen	20,000	3 dokumen	10,000	3 dokumen	10,000	3 dokumen	15,000	3 dokumen	20,000	3 dokumen	75,000	Sekretariat	Bandar Lampung
					KEGIATAN																
			3.25.01.1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**200,000**	**100%**	**59,800**	**100%**	**115,000**	**100%**	**115,000**	**100%**	**190,000**	**100%**	**679,800**		Provinsi Lampung
					KEGIATAN																
			3.25.01.1.05.02	1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 stel	75,000	185 stel	75,000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.05.09	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan		6 orang	100,000	6 orang	14,000	6 orang	45,000	6 orang	45,000	6 orang	45,000	6 orang	249,000	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.05.10	3	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-		60 orang	50,000	60 orang	27,800	60 orang	30,000	75 orang	30,000	75 orang	30,000	75 orang	167,800	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.05.11	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi		50 orang	50,000	50 orang	18,000	50 orang	40,000	75 orang	40,000	75 orang	40,000	75 orang	188,000	Sekretariat	Bandar Lampung
					KEGIATAN																
			3.25.01.1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum OPD**		**100%**	**1,570,000**	**100%**	**1,436,415**	**100%**	**1,448,082**	**100%**	**1,200,000**	**100%**	**1,200,000**	**100%**	**6,854,497**	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.06.01	1	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		20 paket	25,000	20 paket	16,810	20 paket	25,000	20 paket	25,000	20 paket	25,000	20 paket	116,810	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.02	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 paket	40,000	5 paket	31,654	5 paket	98,082	5 paket	40,000	5 paket	40,000	5 paket	249,736	Sekretariat	Bandar Lampung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Data Capaian 2018	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
								TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)	TARGET	Rp.(000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3.25.01.1.06.03	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20 paket	20,000	20 paket	15,000	20 paket	20,000	20 paket	20,000	20 paket	20,000	20 paket	95,000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.04	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	350,000	1 paket	422,943	1 paket	275,000	1 paket	250,000	1 paket	250,000	1 paket	1,547,943	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.05	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 paket	20,000	5 paket	20,000	5 paket	20,000	5 paket	20,000	5 paket	20,000	5 paket	100,000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		5 dokumen	25,000	5 dokumen	22,688	5 dokumen	25,000	5 dokumen	25,000	5 dokumen	25,000	5 dokumen	122,688	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.07	7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		10 paket	50,000	10 paket	38,160	10 paket	80,000	10 paket	80,000	10 paket	80,000	10 paket	328,160	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.08	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	40,000	12 Laporan	35,000	12 Laporan	40,000	12 Laporan	40,000	12 Laporan	40,000	12 Laporan	195,000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.06.09	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		72 Laporan	1,000,000	72 Laporan	834,160	72 Laporan	865,000	72 Laporan	700,000	72 Laporan	700,000	72 Laporan	4,099,160	Sekretariat	Bandar Lampung
				KEGIATAN																	
			3.25.01.1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**100%**	**430,000**	**100%**	**317,939**	**100%**	**655,518**	**100%**	**300,000**	**100%**	**300,000**	**100%**	**1,403,457**		Bandar Lampung
			3.25.01.1.07.01	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	-	-	-	-	-	-	500,000	1 unit	50,000	1 unit	50,000	2 unit	600,000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.07.06	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	10 unit	250,000	10 unit	317,939	10 unit	155,518	10 unit	150,000	10 unit	150,000	10 unit	1,023,457	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.07.10	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	10 unit	180,000	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	100,000	10 unit	100,000	10 unit	380,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				KEGIATAN																	
			3.25.01.1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**1,545,000**	**100%**	**1,853,457**	**100%**	**2,005,000**	**100%**	**1,680,000**	**100%**	**1,700,000**	**100%**	**8,783,457**	Sekretariat	Provinsi Lampung
			3.25.01.1.08.02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Laporan	470,000	12 Laporan	365,237	12 Laporan	425,000	12 Laporan	400,000	12 Laporan	400,000	12 Laporan	2,060,237	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.08.03	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Laporan	75,000	12 Laporan	25,000	12 Laporan	30,000	12 Laporan	30,000	12 Laporan	50,000	12 Laporan	210,000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.08.04	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	1,000,000	12 Laporan	1,463,220	12 Laporan	1,550,000	12 Laporan	1,250,000	12 Laporan	1,250,000	12 Laporan	6,513,220	Sekretariat	Bandar Lampung
				KEGIATAN																	
			3.25.01.1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**		**1 tahun**	**480,000**	**1 tahun**	**232,500**	**1 tahun**	**800,000**	**1 tahun**	**450,000**	**1 tahun**	**450,000**	**1 tahun**	**2,412,500**		Bandar Lampung
			3.25.01.1.09.02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	25 unit	250,000	25 unit	200,000	25 unit	250,000	25 unit	250,000	25 unit	250,000	25 unit	1,200,000	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.09.09	2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 unit	180,000	2 unit	7,500	2 unit	500,000	2 unit	150,000	2 unit	150,000	2 unit	987,500	Sekretariat	Bandar Lampung
			3.25.01.1.09.10	3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		10 unit	50,000	10 unit	25,000	10 unit	50,000	10 unit	50,000	10 unit	50,000	10 unit	225,000	Sekretariat	Bandar Lampung
				72					**39,972,830**		**38,258,170**		**39,981,895**		**37,050,000**		**38,900,000**		**194,162,895**		